

STATISTIK PENDIDIKAN

PROVINSI DKI JAKARTA

2022



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA



STATISTIK PENDIDIKAN

PROVINSI DKI JAKARTA

2022

STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA, 2022

ISSN : -
Nomor Publikasi : 31000.2314
Katalog : 4301002.31

Ukuran Buku : 18,2 X 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 92

Naskah:
BPS Provinsi DKI Jakarta

Penyunting :
BPS Provinsi DKI Jakarta

Cover :
BPS Provinsi DKI Jakarta

Penerbit :
@BPS Provinsi DKI Jakarta

Pencetak : -

Sumber Ilustrasi : -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasi, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab:

Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si.

Penyunting:

Ahmad Azhari, S.Si.

Pemeriksa Tabel dan Grafik:

Rini Apsari, S.Si. M.Si.

Penulis:

Rini Apsari, S.Si, M.si.

Ir. Siti Alifah, MA.

Mega Cahya Kristianti, SST

Pengolah data:

Mega Cahya Kristianti, SST

Pembuat Cover, Infografis dan Layout:

Dimas Hafizh, SST

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNYA sehingga publikasi Statistik Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 ini dapat disusun. Buku ini menyajikan informasi mengenai kondisi Pendidikan di DKI Jakarta.

Publikasi Statistik Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2022 menyajikan data yang utamanya berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022. Selain itu juga disajikan data hasil registrasi sekolah yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk Tahun Ajaran 2022/2023. Data ini memuat informasi mengenai jumlah sekolah, peserta didik, guru, dan sarana prasarana pendidikan.

Kehadiran publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan di bidang pendidikan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang pendidikan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan publikasi sejenis di masa datang

Semoga publikasi ini dapat lebih banyak memberikan manfaat bagi pembangunan bidang Pendidikan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.

Jakarta, Mei 2023

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta



Anggoro Dwitjahyono

<https://jakarta.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	6
1.3 Sistematika Penulisan	6
BAB II METODOLOGI	
2.1 Sumber Data	11
2.2 Konsep dan Definisi	11
BAB III SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	
3.1 Jumlah Sekolah	19
3.2 Jumlah Guru, Murid dan Rasio Murid Guru	24
3.3 Kecukupan ruang Kelas dan Rasio Murid Kelas	34
3.4 Fasilitas Laboratorium dan Perpustakaan	36
BAB IV PARTISIPASI SEKOLAH	
4.1 Angka Partisipasi Sekolah	43
4.2 Angka Partisipasi Kasar	46
4.3 Angka Partisipasi Murni	49
BAB V KEGIATAN PESERTA DIDIK	
5.1 Akses Terhadap Teknologi, Informasi dan Komunikasi	54
5.2 Aktivitas Peserta Didik Selain Sekolah	68
BAB VI HASIL DAN CAPAIAN PROSES PENDIDIKAN	
6.1 Akses Melek Huruf (AMH)	74
6.2 Angka Putus Sekolah	82
6.3 Rata-rata Lama Sekolah	87
6.4 Tingkat Penyelesaian Sekolah	89

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan TK dan Dasar serta Pengelolanya, Tahun ajaran 2022/2023	20
Tabel 3.2.	Jumlah Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan Menengah dan Pengelolanya, Tahun ajaran 2022/2023	21
Tabel 3.3.	Jumlah Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan dibawah Kementerian Agama dan Pengelolanya, Tahun Ajaran 2022/2023	22
Tabel 3.4.	Jumlah Perguruan Tinggi dan Mahasiswa Menurut Kabupaten/Kota dibawah Kementerian Agama dan Pengelolanya, Tahun Ajaran 2022/2023	23
Tabel 3.5.	Jumlah Murid Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan Dasar dan Pengelolanya, Tahun ajaran 2022/2023	25
Tabel 3.6.	Jumlah Murid Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan Menengah dan Pengelolanya, Tahun ajaran 2022/2023	26
Tabel 3.7	Jumlah Murid Menurut Kabupaten/Kota, Per Jenjang Pendidikan Menengah dan Pengelolanya (dibawah Kemenag), Tahun ajaran 2022/2023	27
Tabel 3.8.	Jumlah Guru Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan Menengah dan Pengelolanya, Tahun ajaran 2022/2023	31
Tabel 3.9.	Jumlah Guru Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan serta Pengelolanya (dibawah Kemenag), Tahun ajaran 2022/2023	31
Tabel 3.10.	Rasio Murid-Guru Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan Dasar dan Pengelolanya, Tahun ajaran 2022/2023	32
Tabel 3.11.	Rasio Murid-Guru Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan Menengah dan Pengelolanya, Tahun ajaran 2022/2023	33
Tabel 3.12	Rasio Murid-Guru Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan dan Pengelolanya (Kemenag), Tahun ajaran 2022/2023	34
Tabel 3.13	Jumlah Kelas, rombongan Belajar, dan Rasio murid-Kelas Menurut Jenjang Pendidikan 2022/2023	36
Tabel 3.14	Jumlah Laboratorium, Perpustakaan, dan Rasio Laboratorium-Sekolah, dan Rasio Perpustakaan-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan 2022/2023	38

Tabel 5.1.	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota di DKI Jakarta, 2022	56
Tabel 5.2	Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	58
Tabel 5.3.	Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Komputer ^{*)} Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	60
Tabel 5.4.	Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas yang Pernah Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	63
Tabel 5.5	Persentase Penduduk Masih Sekolah yang Pernah Mengakses Internet Menurut Media yang Digunakan dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	64
Tabel 5.6	Persentase Penduduk Masih Sekolah yang Pernah Mengakses Internet Menurut Lokasi Mengakses Internet dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	66
Tabel 5.7.	Persentase Penduduk Masih Sekolah yang Pernah Mengakses Internet Menurut Tujuan Akses Internet dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	68
Tabel 5.8.	Persentase Penduduk Masih Sekolah Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	70
Tabel 5.9.	Persentase Penduduk Masih Sekolah yang Melakukan Kegiatan Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan yang Saat ini Sedang Diikuti dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	71
Tabel 6.1.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Latin/Alfabet, dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	77
Tabel 6.2.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Arab/Hijaiyah, dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	78
Tabel 6.3.	Persentase Penduduk Berumur 15 - 24 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Latin/Alfabet, dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	81
Tabel 6.4	Persentase Penduduk Berumur 15 - 24 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Arab/Hijaiyah, dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	82

Tabel 6.5.	Jumlah Putus Sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK Menurut Status Negeri dan Swasta di DKI Jakarta, 2012/2022	83
Tabel 6.6.	Perkembangan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SMA dan SMK di DKI Jakarta, 2018-2023	87
Tabel 6.7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2022 (Tahun)	88

<https://jakarta.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Jumlah Guru Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan SD dan Pengelolanya, Tahun ajaran 2022/2023	29
Gambar 3.2	Jumlah Guru Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan SMP dan Pengelolanya, Tahun ajaran 2022/2023	30
Gambar 4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Sekolah Menurut Jenis Kelamin, di DKI Jakarta, 2022	46
Gambar 4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, di DKI Jakarta, 2022	48
Gambar 4.3	Angka Partisipasi Kasar (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2022	51
Gambar 5.1	Persentase Penduduk yang Masih Sekolah yang Menggunakan Telepon Seluler Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	57
Gambar 5.2	Persentase Penduduk yang Masih Sekolah yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	59
Gambar 5.3	Persentase Penduduk Masih Sekolah Menurut yang Menggunakan Komputer*) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	61
Gambar 5.4	Persentase Penduduk Masih Sekolah yang Pernah Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	63
Gambar 6.1.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	76
Gambar 6.2.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Lainnya, dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	79
Gambar 6.3.	Persentase Penduduk Berumur 15 - 24 Tahun Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	80
Gambar 6.4.	Persentase Penduduk Berumur 15 - 24 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Lainnya, dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022	82

Gambar 6.5.	Persentase Putus Sekolah Siswa SD, SMP, SMA, dan SMK Menurut Status Negeri dan Swasta di DKI Jakarta, 2021/2022	84
Gambar 6.6.	Persentase Putus Sekolah Siswa SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri di DKI Jakarta, 2021-2022	85
Gambar 6.7.	Persentase Putus Sekolah Siswa SD, SMP, SMA, dan SMK Swasta di DKI Jakarta, 2021-2022	86
Gambar 6.8.	Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin, DKI Jakarta Tahun 2022 (Persen)	90

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN



B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia yang terprogram dengan baik merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan nasional. Belajar dari negara-negara maju di bidang industri di Asia Timur, untuk meningkatkan pembangunan suatu bangsa diperlukan apa yang disebut *critical mass* di bidang pendidikan. Konsep ini mengupayakan adanya peningkatan persentase penduduk dengan tingkat pendidikan tertentu yang harus disiapkan agar pembangunan ekonomi dan sosial dapat meningkat dengan cepat.

Program Pendidikan Dasar merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan *critical mass* tersebut, selain itu juga dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang terdidik, minimal memiliki kemampuan dasar yang esensial. Dengan kemampuan dasar ini diharapkan dapat digunakan para lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dijadikan bekal untuk menjalani hidup dan menghadapi kehidupan dalam masyarakat yang berkualitas.

Kemampuan dasar sangat diperlukan untuk bersosialisasi, termasuk untuk melakukan interaksi, kompetisi, dan berorganisasi dengan warga masyarakat maupun antar bangsa. Penyelenggaraan program Pendidikan Dasar disamping untuk mengupayakan pencapaian target angka partisipasi secara maksimal tetapi juga untuk mengupayakan perbaikan kualitas Pendidikan Dasar yang selama ini masih jauh dari standar.

Kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang sudah dicanangkan merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam melaksanakan amanat dalam ketentuan berbagai dokumen

internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Salah satu acuan penyusunan laporan program pendidikan dasar adalah kesepakatan Kerangka Aksi Dakar tentang Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau *Education for All (EFA)*. Salah satu ketentuan yang ada dalam kesepakatan tersebut menyatakan bahwa menjelang akhir tahun 2015 setiap negara menjamin semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam kesulitan dan mereka yang termasuk dalam minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik.

Selain itu Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) menyatakan bahwa setiap negara di dunia wajib melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas. Konvensi mengenai Hak-hak Azasi Manusia (HAM) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan yang bebas biaya, setidaknya pada pendidikan dasar yang bersifat wajib (Deklarasi HAM).

Semua ketentuan dalam kesepakatan internasional itu sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang intinya menyatakan bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa di mana setiap warga negara Republik Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu, tanpa memandang status sosial, etnis dan gender. Sehingga bukan hanya pendidikan dasar yang menjadi target keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, namun juga pendidikan menengah dan pendidikan tinggi perlu mendapat perhatian yang serius, termasuk didalamnya pendidikan informal dan non formal.

Visi Pendidikan Indonesia 2035 pada Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya

Indonesia dan Pancasila. Peta Jalan tersebut dirancang untuk mengantisipasi disrupsi perubahan teknologi, sosial, dan lingkungan yang sedang terjadi secara global. Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi diperlukan agar bangsa Indonesia dapat bertahan menghadapi disrupsi sehingga lebih maju dan sejahtera. Pendidikan menjadi salah satu sarana untuk membentuk generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, tetapi juga memiliki akhlak mulia, berkarakter kuat, toleran, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan selalu siap bekerja sama.

Sudah lebih dari dua tahun pandemi COVID-19 melanda negeri ini. Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak cukup fatal terhadap implementasi pembelajaran. Untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, Pemerintah Indonesia telah menginstruksikan sekolah maupun perguruan tinggi untuk melakukan beberapa tindakan pencegahan di masing-masing satuan pendidikan sebagaimana yang tertera dalam surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada satuan pendidikan. Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan beberapa kebijakan terkait proses belajar mengajar peserta didik, penilaian dan penentuan kelulusan, serta penerimaan peserta didik baru agar dapat terlaksana tanpa adanya risiko yang dapat membahayakan kesehatan peserta didik maupun pendidik.

Sejak pertama kali kasus COVID-19 ditemukan di Indonesia pada Maret 2020, peserta didik diminta untuk mengikuti proses belajar mengajar melalui pembelajaran jarak jauh (Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020). Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai kurang efektif dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka secara langsung.

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem, tidak hanya di Indonesia,

menurunnya efektifitas PJJ juga terjadi di seluruh dunia (Kompas, 2021). Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal tersebut salah satunya disebabkan karena minimnya konektivitas internet serta tidak adanya perangkat gawai untuk belajar secara *online*. Untuk mengantisipasi kondisi pandemi, pemerintah telah mengambil kebijakan terkait ketentuan penilaian serta kelulusan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Melalui publikasi ini diharapkan gambaran kondisi Pendidikan di DKI Jakarta disaat pandemic Covid-19 juga dapat terlihat.

1.2. Tujuan

Penyusunan publikasi Statistik Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 bertujuan:

1. Memberikan gambaran situasi dan kondisi pendidikan di Provinsi DKI Jakarta sampai tahun 2022;
2. Untuk mengetahui indikator hasil pembangunan di bidang pendidikan yang dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yang diwakili dengan indikator angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan indicator Pendidikan lainnya.

1.3. Sistematika Penyusunan

Publikasi Statistik Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dikelompokkan dalam 6 bagian, yaitu: pendahuluan, metodologi, sarana dan prasarana pendidikan, partisipasi sekolah, kegiatan peserta didik, hasil dan capaian proses pendidikan.

Bab I menjelaskan latar belakang penyusunan publikasi ini dilanjutkan dengan tujuan dan sistematika penulisan.

Pada Bab II Metodologi, membahas tentang metode analisis yang digunakan, sumber data yang digunakan dalam publikasi ini, dan konsep serta definisi yang digunakan pada variabel dan indikator penting pendidikan yang disajikan antara lain Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Melek Huruf, Rasio Guru-Murid, dan lainnya.

Pada Bab III diuraikan data sarana dan prasarana pendidikan yang mencakup jumlah sekolah, jumlah guru, murid dan rasio murid guru, ketersediaan ruang kelas, rasio murid-kelas, dan fasilitas laboratorium dan perpustakaan.

Pada Bab IV dipaparkan indikator pendidikan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang Pendidikan. Indikator tersebut antara lain, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni.

Selanjutnya pada Bab V diuraikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan peserta didik, seperti akses terhadap TIK dan aktivitas peserta didik selain bersekolah. Pada Bab VI disajikan Hasil dan Capaian Proses Pendidikan yang meliputi indikator Angka Melek Huruf, Angka Putus Sekolah, dan Tingkat Pendidikan Sekolah secara umum.

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB II METODOLOGI



<https://jakarta.bps.go.id>

B A B II

METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan penyusunan indikator pendidikan dalam publikasi ini sebagian besar bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2022 yang dilaksanakan oleh BPS pada bulan Maret tahun 2022. Selain itu digunakan pula data yang bersumber dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Pusdatin Kemendikbudristek serta Kanwil Kemenang Provinsi DKI Jakarta. Pembahasan yang disajikan dalam publikasi Statistik Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2022 ini menggunakan metode analisis deskriptif, yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi pendidikan di DKI Jakarta pada tahun 2022.

2.2 Konsep dan Definisi

Konsep serta definisi dari indikator-indikator yang digunakan disajikan di bawah ini :

Penduduk adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama satu tahun atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari satu tahun.

Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami

satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga.

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari satu tahun dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama satu tahun atau lebih, atau kurang dari 1 tahun tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 1 tahun atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah 1 tahun atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 1 tahun tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah murid terhadap jumlah guru.

Rasio kelas-guru adalah perbandingan antara jumlah kelas pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah guru.

Rasio murid-kelas adalah perbandingan jumlah murid dalam suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah kelas yang tersedia.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/ MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat dan PT.

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Partisipasi sekolah yaitu menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini. Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu:

Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Pendidikan pra sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal, contoh: Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA).

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/ MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B dan paket C.

Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang

sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah.

SD/MI meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SMP/MTs meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.

SMA/MA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I, II, III dan IV dan sederajat.

Dapat membaca dan menulis, artinya dapat membaca dan menulis kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

- **Huruf latin**, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin;
- **Huruf lainnya**, bila responden hanya dapat membaca dan menulis selain huruf latin, misalnya huruf arab, cina, kanji, dan sebagainya;
- **Huruf latin dan huruf lainnya**, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya;
- **Tidak dapat membaca dan menulis**, bila responden tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Catatan:

1. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin.
2. Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.
3. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya.

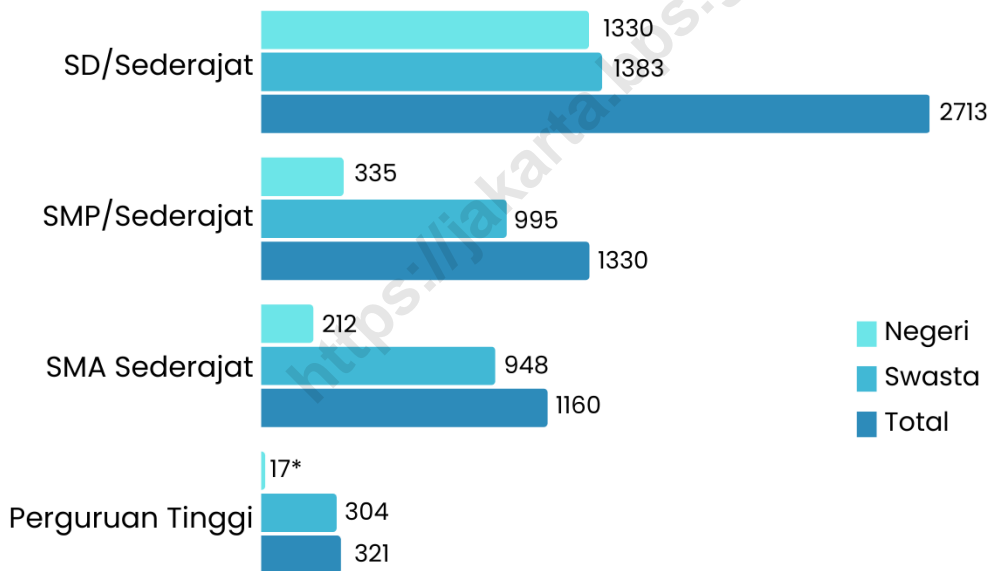
Angka Putus Sekolah (APTs) adalah persentase siswa/murid dengan jenjang pendidikan tertentu yang tidak lagi mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut.

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB III

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Jumlah Sekolah di Provinsi DKI Jakarta menurut Jenjang Pendidikan, 2022/2023



Keterangan:

* 4 Perguruan Tinggi Negeri dan 13 Perguruan Tinggi Kedinasan

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta (Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023)

Secara umum **sekolah swasta** lebih banyak daripada sekolah negeri untuk semua jenjang pendidikan



<https://jakarta.bps.go.id>

BAB III

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Sesuai bunyi Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, penyelenggaraan pendidikan berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Gambaran tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan di DKI Jakarta akan dibahas pada bab ini, yaitu jumlah sekolah, murid dan guru serta sarana dan prasarana Pendidikan lainnya.

3.1. Jumlah Sekolah

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta memiliki fasilitas pendidikan yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Gedung-gedung sekolah, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta, tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Selain itu pada jalur non formal, juga diselenggarakan program pendidikan untuk anak tak mampu, anak jalanan dan anak terlantar melalui rumah singgah yang dikelola oleh Dinas Sosial. Begitu pula untuk penduduk lanjut usia yang tidak dapat membaca menulis disediakan program kejar paket A dan paket B. Bagi penduduk usia sekolah yang tidak dapat menyelesaikan

pendidikan SD hingga SLTA di jalur pendidikan formal, disediakan program kejar Paket Setara SD, Kejar Paket Setara SLTP, dan Kejar Paket Setara SLTA. Dengan fasilitas yang lebih banyak dibandingkan wilayah lain di Indonesia, maka keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di DKI Jakarta seyogyanya menjadi barometer bagi wilayah lainnya. Tabel 3.1 menyajikan fasilitas gedung sekolah yang ada di DKI Jakarta menurut jenjang pendidikan dan status pengelolaannya (negeri/swasta).

Tabel 3.1. Jumlah Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan TK dan Dasar serta Pengelolaannya, Tahun ajaran 2022/2023

Kab Kota	TK			SD			SMP		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pulau Seribu	9	1	10	14	0	14	7	0	7
Jakarta Selatan	15	392	407	279	181	460	66	158	224
Jakarta Timur	21	597	618	401	208	609	95	167	262
Jakarta Pusat	13	173	186	158	101	259	36	75	111
Jakarta Barat	9	417	426	320	243	563	50	231	281
Jakarta Utara	12	261	273	136	198	334	39	154	193
DKI Jakarta	79	1841	1920	1308	931	2239	293	785	1078

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Dari table 3.1 terlihat bahwa pada tahun ajaran 2022/2023 gedung sekolah di tingkat Taman Kanak-kanak (TK) berjumlah 1.920 buah. Gedung SD berjumlah 2.239 buah, gedung sekolah di tingkat SMP berjumlah 1.078 buah. Dengan melihat pengelolaannya, tampak bahwa di jenjang TK, pengelolaan oleh swasta jauh lebih besar persentasenya dibandingkan dengan pengelolaan oleh pemerintah/negeri, dimana perbandingan swasta sebanyak 95,88

persen dan negeri sebesar 4,12 persen. Pada jenjang SD, pengelolaan oleh negeri proporsinya lebih banyak dibandingkan swasta, dimana perbandingannya sebesar 58,41 persen negeri dan 41,58 persen dikelola oleh swasta.

Pada jenjang SMP, jumlah sekolah yang ada di DKI Jakarta sebanyak 1.078 sekolah. SMP yang dikelola negeri proporsinya hanya sekitar sepertiga dari seluruh SMP yang ada di DKI Jakarta, yakni sebanyak 27,18 persen, sisanya 72,82 persen merupakan kontribusi oleh pihak swasta.

Tabel 3.2. Jumlah Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Pengelolanya, Tahun ajaran 2022/2023

Kab Kota	SMU			SMK			Perguruan tinggi		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	PTK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pulau Seribu	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Jakarta Selatan	29	75	104	18	107	125	2	85	5
Jakarta Timur	40	82	122	21	172	193	1	82	4
Jakarta Pusat	13	43	56	14	43	57	1	59	3
Jakarta Barat	17	101	118	11	109	120	0	30	0
Jakarta Utara	17	74	91	8	68	76	0	16	1
DKI Jakarta	117	375	492	73	499	572	4	272	13

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Pada jenjang pendidikan menengah, yakni di tingkat SMU dan SMK, gedung sekolah SMU yang ada di DKI Jakarta berjumlah 492 buah. Sementara gedung SMK sebanyak 572 buah. Artinya sekolah pada jenjang SMK lebih banyak dibandingkan dengan SMU. Sementara jika dilihat dari pengelolaannya, pada jenjang pendidikan menengah terlihat bahwa peran swasta sangat besar. Hal ini tampak dari partisipasi pihak swasta dalam mengelola sekolah jenjang SMU

hingga mencapai 76,22 persen. Pada jenjang SMK keterlibatan swasta lebih besar lagi, dimana 87,24 persen SMK yang ada di DKI Jakarta dikelola oleh pihak swasta, sisanya sebanyak 12,76 persen dikelola oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya jumlah sekolah pada jenjang Pendidikan menengah disajikan pada Tabel 3.2.

Pada jenjang Perguruan Tinggi jumlah sekolah sebanyak 289 buah, dengan rincian 4 buah merupakan Perguruan Tinggi Negeri, dan 272 merupakan Perguruan tinggi Swasta. Sisanya sebanyak 13 buah merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan.

Tabel 3.3. Jumlah Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan dibawah Kementerian Agama dan Pengelolaanya, Tahun Ajaran 2022/2023

Kab Kota	MI			MTs			MA		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(8)	(9)	(10)	(14)	(15)	(16)	(8)	(9)	(10)
Kep. Seribu	1	0	1	1	0	1	0	1	1
Jakarta Selatan	6	132	138	9	57	66	5	23	28
Jakarta Timur	7	124	131	18	82	100	8	23	31
Jakarta Pusat	1	14	15	1	9	10	1	6	7
Jakarta Barat	4	113	117	9	34	43	6	10	16
Jakarta Utara	3	69	72	4	28	32	2	11	13
Jumlah	22	452	474	42	210	252	22	74	96

Sumber : Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta

Selain seolah yang dibawah kewenangan Kemendikbudristek, ada juga sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Jika melihat sekolah-sekolah yang berada di kewenangan Kementerian Agama, maka jumlah sekolah yang ada di DKI Jakarta semakin bertambah. Hal ini berlaku untuk semua jenjang Pendidikan. Sama halnya dengan sekolah yang berada dibawah

kewenangan Kemendikbudristek, sekolah-sekolah dibawah kewenangan Kemenag yang dikelola oleh pihak swasta juga memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan sekolah yang dikelola pemerintah. Untuk lebih jelasnya tabel 3.3 berikut menggambarkan jumlah sekolah yang ada dibawah kewenangan Kemenag menurut jenjang Pendidikan dan kabupaten/kota.

Pada jenjang Perguruan Tinggi/Universitas, Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta juga membawahi 32 Perguruan Tinggi yang tersebar di lima wilayah kota DKI Jakarta. Wilayah terbanyak yang memiliki Perguruan Tinggi dibawah Kementerian agama terdapat di Jakarta Timur. Sementara yang paling sedikit terdapat di Jakarta Barat, yaitu hanya 1 Perguruan Tinggi. Kabupaten Kepulauan Seribu sama sekali tidak memiliki Perguruan tinggi. Sementara jika melihat dari pengelolanya, dari 32 Perguruan tinggi yang ada di DKI Jakarta, tidak ada satu pun yang dikelola oleh swasta.

Tabel 3.4. Jumlah Perguruan Tinggi dan Mahasiswa Menurut Kabupaten/Kota dibawah Kementerian Agama dan Pengelolanya, Tahun Ajaran 2022/2023

Kab Kota	Jumlah Perguruan tinggi (Kemenag)			Jumlah Mahasiswa		
	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
(1)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)
Kep. Seribu	0	0	0	0	0	0
Jakarta Selatan	0	9	9	0	10280	10280
Jakarta Timur	0	16	16	0	6792	6792
Jakarta Pusat	0	3	3	0	2391	2391
Jakarta Barat	0	1	1	0	299	299
Jakarta Utara	0	3	3	0	2558	2558
Jumlah	0	32	32	0	22320	22320

Sumber : Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta

3.2. Jumlah Murid dan Guru, dan Rasio Murid-Guru

Selain fasilitas gedung sekolah, jumlah murid, guru, dan rasio murid-guru dapat dijadikan indikator keberhasilan pendidikan. Semakin rendah rasio murid-guru, diharapkan semakin baik tingkat keberhasilan proses belajar pada anak didik di sekolah. Hal ini karena beban guru dalam mendidik siswa relatif lebih ringan dibandingkan dengan rasio murid-guru yang relatif tinggi.

A. Jumlah Murid

Tabel 3.3 memperlihatkan jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan. Sejalan dengan tingginya angka partisipasi sekolah pada tingkat SD, jumlah murid di SD merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan jenjang pendidikan di atasnya. Pada jenjang pendidikan SMP dan SMU, jumlah murid mulai berkurang. Murid SD di DKI Jakarta pada Tahun Ajaran 2022/2023 sebanyak 765 ribu orang, dengan proporsi murid SD negeri sebanyak 71,46 persen dan sisanya 28,54 persen murid di SD swasta. Nampaknya hal ini sejalan dengan banyak jumlah sekolah SD negeri yang memang lebih banyak dibandingkan SD swasta, dimana perbandingannya 3 SD negeri berbanding dengan 2 SD swasta.

Pada jenjang SMP, jumlah murid mengalami penurunan sekitar separuhnya dari jumlah murid SD yakni sekitar 350 ribu orang. Penurunan ini disebabkan karena beberapa alasan, diantaranya murid tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan formal di atasnya, namun memilih jalur pendidikan non formal seperti paket A, B atau C. Selain itu alasan lainnya mereka memilih melanjutkan ke sekolah keagamaan

seperti pesantren diniyah atau seminari dan sejenisnya, dan alasan lainnya, membantu keluarga menambah penghasilan rumahtangga.

Tabel 3.5. Jumlah Murid Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan Dasar dan Pengelolanya, Tahun ajaran 2022/2023

Kab Kota	SD			SMP		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pulau Seribu	2.522	-	2.522	989	-	989
Jakarta Selatan	114.106	41.336	155.442	50.067	25.333	75.400
Jakarta Timur	182.504	53.065	235.569	76.339	27.496	103.835
Jakarta Pusat	56.262	18.822	75.084	24.342	14.591	38.933
Jakarta Barat	118.584	54.146	172.730	37.929	36.953	74.882
Jakarta Utara	72.735	51.008	123.743	29.877	25.850	55.727
DKI Jakarta	546.713	218.377	765.090	219.543	130.223	349.766

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Sama halnya dengan jenjang SD, jumlah murid SMP negeri lebih banyak dibandingkan dengan murid SMP swasta, dimana sekitar 220 ribu murid merupakan murid SMP negeri (62,77 persen), sedangkan murid SMP swasta sebanyak 130 ribu (37,23 persen). Hal ini terlihat kontradiktif jika dilihat proporsi SMP negeri yang relatif lebih rendah dibandingkan proporsi SMP swasta, dimana SMP negeri sebanyak 27,18 persen dan SMP swasta sebanyak 72,82 persen).

Pada jenjang pendidikan menengah, jumlah murid yang bersekolah di SMU dan SMK juga mengalami penurunan hamper separuhnya dibandingkan dengan murid pada jenjang SMP. Beberapa faktor penyebabnya sama seperti penurunan pada jenjang SD ke SMP, sebagian memilih ke jalur pendidikan non formal, memasuki dunia

kerja, dan sebagian kecil ada yang sudah memasuki jenjang perkawinan.

Hal lain yang menarik untuk diamati adalah pada jenjang pendidikan SMK, ternyata minat masyarakat mengikuti pendidikan di SMK jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang SMU. Hal ini terlihat dari banyaknya murid di jenjang SMK dibandingkan dengan murid SMU, dimana murid SMK mencapai sekitar 195.974 siswa, sedangkan di SMU hanya sebanyak 189.887 siswa. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya minat bersekolah di sekolah kejuruan dikarenakan secara praktis dengan keterampilan yang dimiliki, lulusan SMK relatif lebih siap memasuki pasar kerja.

Tabel 3.6. Jumlah Murid Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan Menengah dan Pengelolaannya, Tahun ajaran 2022/2023

Kab Kota	SMU			SMK		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pulau Seribu	509	-	509	363	-	363
Jakarta Selatan	23.228	23.084	46.312	13.352	29.854	43.206
Jakarta Timur	32.215	28.350	60.565	16.117	42.401	58.518
Jakarta Pusat	9.136	11.504	20.640	11.168	11.844	23.012
Jakarta Barat	13.180	21.486	34.666	7.966	35.481	43.447
Jakarta Utara	12.557	14.638	27.195	7.802	19.626	27.428
DKI Jakarta	90.825	99.062	189.887	56.768	139.206	195.974

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Jika diamati menurut pengelolaannya, murid SMU negeri relatif lebih sedikit dibandingkan dengan murid SMU swasta, dimana murid SMU negeri sebanyak 90.825 orang (47,83 persen), sementara murid SMU swasta sebanyak 99.062 (52,17 persen). Pada jenjang SMK pun demikian, persentase murid negeri jauh lebih rendah dibandingkan

murid SMK swasta, dimana murid persentase murid SMK negeri sebesar 28,97 persen, sementara persentase murid SMK swasta mencapai 71,03 persen.

Tabel 3.7. Jumlah Murid Menurut Kabupaten/Kota, Per Jenjang Pendidikan Menengah dan Pengelolanya (dibawah Kemenag), Tahun ajaran 2022/2023

Kab Kota	MI			MTs			MA		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
Kep. Seribu	478	-	478	335	-	335	-	144	144
Jakarta Selatan	3.104	28.256	31.360	5.706	11.337	17.043	4.059	3.943	8.002
Jakarta Timur	3.946	29.120	33.066	10.426	10.743	21.169	6.066	2.208	8.274
Jakarta Pusat	457	2.361	2.818	496	1.320	1.816	688	745	1.433
Jakarta Barat	2.142	31.709	33.851	4.414	8.044	12.458	3.671	2.276	5.947
Jakarta Utara	1.533	19.683	21.216	2.408	4.540	6.948	1.094	1.258	2.352
Jumlah	11.660	111.129	122.789	23.785	35.984	59.769	15.578	10.574	26.152
Persentase	9,50	90,50	100,00	39,79	60,21	100,00	59,57	40,43	100,00

Sumber : Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta

Untuk sekolah-sekolah yang berada dibawah kewenangan Kemenag, terlihat bahwa jumlah murid pada jenjang MI dan MTs murid di sekolah swasta lebih banyak dibandingkan murid di sekolah negeri. Namun pada jenjang Pendidikan MA, murid di sekolah negeri justru lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan murid di MA swasta. Hal ini nampaknya sejalan dengan banyaknya jumlah sekolah yang dikelola oleh pihak swasta di masing-masing jenjang Pendidikan tersebut.

B. Jumlah Guru

Bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam

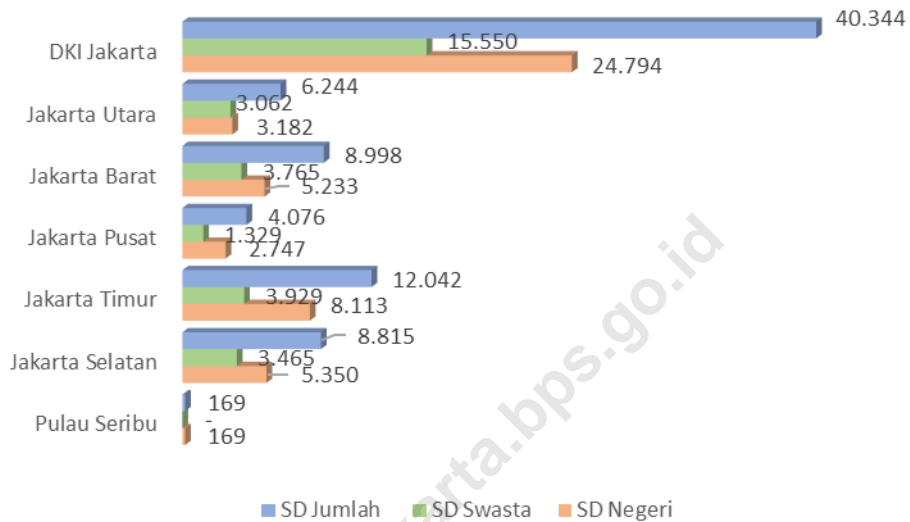
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. RPJMN 2020-2024 tersebut merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pendidikan menjadi bagian dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari 7 agenda pembangunan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM sebagai manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter menjadi target pembangunan bidang pendidikan. Selain itu fokus utama pembangunan pendidikan pada RPJMN 2020-2024 masih kepada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui dunia pendidikan, maka keberadaan guru sebagai tenaga pendidikan sangatlah penting. Guru yang berkualitas dan mampu melakukan transfer pengetahuan dengan baik diharapkan akan menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas pada generasi mendatang.

Pada Gambar 3.1 dapat dilihat jumlah guru sebagai tenaga pendidik di sekolah menurut jenjang pendidikan. Jumlah guru SD merupakan yang terbanyak dibandingkan jumlah guru pada jenjang di atasnya. Hal ini sejalan dengan banyaknya jumlah sekolah serta murid pada jenjang SD yang memang yang terbanyak dibandingkan jenjang pendidikan di atasnya, yakni sebanyak 40.344 guru. Guru SD negeri

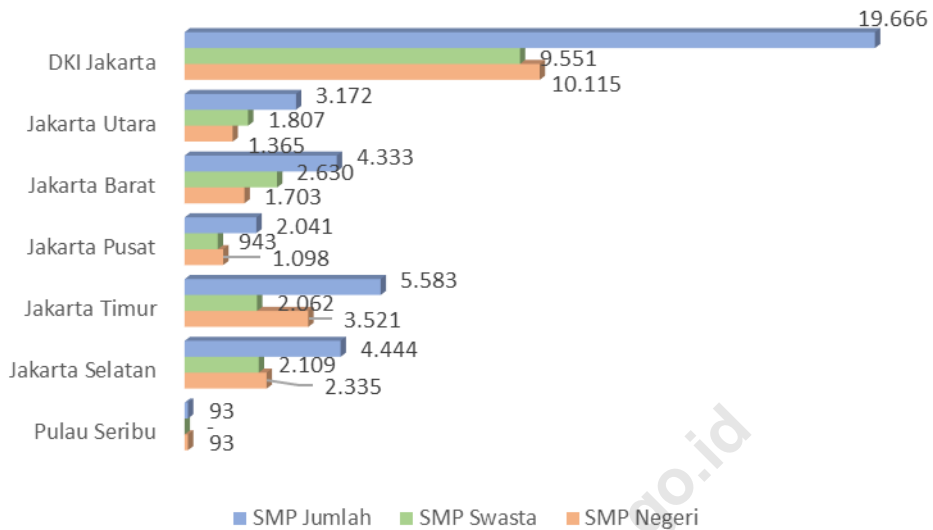
lebih banyak dibandingkan dengan SD swasta, persentasenya adalah 61,46 persen guru SD negeri dan 38,54 persen guru SD swasta.



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 3.1 Jumlah Guru Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan SD dan Pengelolaannya, Tahun ajaran 2022/2023

Pada jenjang SMP, jumlah guru berkurang hingga separuhnya dibandingkan dengan banyaknya guru SD, dengan jumlah 19.666 guru SMP. Perbandingan jumlah guru SMP negeri dan swasta relatif tidak terlalu jauh, dimana persentase guru SMP negeri sebanyak 51,43 persen, sementara guru SMP swasta sebanyak 48,57 persen.



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 3.2 Jumlah Guru Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan SMP dan Pengelolaannya, Tahun ajaran 2022/2023

Berbeda dengan jenjang pendidikan dasar, pada pendidikan menengah jumlah guru swasta relatif lebih banyak dibandingkan dengan guru negeri. Untuk guru SMU, dengan jumlah guru sebanyak 11.823 orang, 56,51 persen merupakan guru SMU swasta. Begitu pula dengan SMK, dari 11.801 jumlah guru yang ada di SMK, 72,07 persen merupakan guru SMK swasta.

Dengan melihat banyaknya guru pada sekolah swasta dibandingkan guru negeri hampir di seluruh jenjang pendidikan, tentunya ini menjadi perhatian baik pemerintah maupun swasta. Perlunya upaya dan regulasi yang dapat meningkatkan kompetensi para guru, baik melakukan program sertifikasi guru maupun peningkatan kesejahteraan guru.

Tabel 3.8. Jumlah Guru Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan Menengah dan Pengelolaannya, Tahun ajaran 2022/2023

Kabupaten/ Kota	SMU			SMK		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pulau Seribu	36	-	36	46	-	46
Jakarta Selatan	1.313	1.587	2.900	809	2.052	2.861
Jakarta Timur	1.876	1.696	3.572	886	2.792	3.678
Jakarta Pusat	527	759	1.286	658	771	1.429
Jakarta Barat	728	1.569	2.297	466	1.789	2.255
Jakarta Utara	662	1.070	1.732	431	1.101	1.532
DKI Jakarta	5.142	6.681	11.823	3.296	8.505	11.801

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk sekolah-sekolah yang berada dibawah kewenangan Kanwil Kemenag, tampak bahwa jika dibandingkan dengan sekolah yang berada dibawah kewenangan Kemendikbudristek, jauh lebih sedikit jumlah gurunya. Hal ini sejalan dengan jumlah sekolah yang ada di masing-masing institusi tersebut.

Tabel 3.9 Jumlah Guru Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan serta Pengelolaannya (dibawah Kemenag), Tahun ajaran 2022/2023

Kab Kota	MI			MTs			MA		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
Kep. Seribu	43	-	43	61	-	61	-	12	12
Jakarta Selatan	219	1.847	2.066	368	1.048	1.416	276	430	706
Jakarta Timur	228	1.701	1.929	780	1.113	1.893	414	281	695
Jakarta Pusat	32	166	198	40	144	184	54	88	142
Jakarta Barat	117	1.526	1.643	295	616	911	289	233	522
Jakarta Utara	89	964	1.053	186	407	593	85	192	277
Jumlah	728	6.204	6.932	1.730	3.328	5.058	1.118	1.236	2.354
Persentase	10,50	89,50	100,00	34,20	65,80	100,00	47,49	52,51	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

C. Rasio Murid-Guru

Indikator Pendidikan yang dapat menggambarkan beban kerja seorang guru yang juga berimplikasi pada kualitas pengajaran adalah rasio murid-guru. Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Pada Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah guru dan jumlah murid yang ada di Jakarta untuk tahun ajaran 2022/2023 secara umum berada di bawah angka 1:20. Artinya rasio murid-guru untuk setiap jenjang pendidikan berada di atas rasio ideal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini dapat dikatakan baik karena dengan jumlah peserta didik yang lebih sedikit, guru dapat memberikan fokus dan perhatian yang lebih selama proses pembelajaran.

Tabel 3.10. Rasio Murid-Guru Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan Dasar dan Pengelolanya, Tahun ajaran 2022/2023

Kabupaten/ Kota	SD			SMP		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kep. Seribu	14,92	-	14,92	10,63	-	10,63
Jakarta Selatan	21,33	11,93	17,63	21,44	12,01	16,97
Jakarta Timur	22,50	13,51	19,56	21,68	13,33	18,60
Jakarta Pusat	20,48	14,16	18,42	22,17	15,47	19,08
Jakarta Barat	22,66	14,38	19,20	22,27	14,05	17,28
Jakarta Utara	22,86	16,66	19,82	21,89	14,31	17,57
DKI Jakarta	22,05	14,04	18,96	21,70	13,63	17,79

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Namun demikian, jika dilihat dari pengelolaannya, maka terlihat bahwa rasio murid-guru pada sekolah negeri lebih besar dari rasio

murid-guru pada sekolah swasta. Bahkan untuk rasio murid-guru di sekolah negeri melebihi dari angka ideal yang dianjurkan pemerintah, yakni melebihi 1:20.

Tabel 3.10. memperlihatkan rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah menurut jenjang pendidikan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa rasio murid-guru pada tingkat SD paling tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa beban guru di SD lebih berat dibandingkan beban guru pada tingkat SLTP dan SLTA. Pada tingkat SD, rasio murid-guru sebesar 18,96 yang berarti beban seorang guru rata-rata mengajar untuk sekitar 19 murid. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan keadaan tahun 1990-an, dimana rasio murid-guru di tingkat SD mencapai sekitar 40 murid per satu orang guru. Artinya fasilitas gedung sekolah yang semakin banyak mengurangi beban kerja guru, karena distribusi guru menjadi lebih tersebar.

Tabel 3.11. Rasio Murid-Guru Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan Menengah dan Pengelolaannya, Tahun ajaran 2022/2023

Kabupaten/Kota	SMU			SMK		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pulau Seribu	14,14	-	14,14	7,89	-	7,89
Jakarta Selatan	17,69	14,55	15,97	16,50	14,55	15,10
Jakarta Timur	17,17	16,72	16,96	18,19	15,19	15,91
Jakarta Pusat	17,34	15,16	16,05	16,97	15,36	16,10
Jakarta Barat	18,10	13,69	15,09	17,09	19,83	19,27
Jakarta Utara	18,97	13,68	15,70	18,10	17,83	17,90
DKI Jakarta	17,66	14,83	16,06	17,22	16,37	16,61

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Pada tingkat SLTP rasio murid-guru sebesar 17,79 yang berarti setiap guru rata-rata mengajar untuk sekitar 18 orang murid. Pada jenjang SMU rasio murid-guru lebih rendah, yaitu 16,06, atau dengan kata lain setiap guru rata-rata mengajar untuk sekitar 16 murid. Sementara rasio murid-guru pada jenjang SMK sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan SMU, yaitu 16,61 atau rata-rata seorang guru mengajar 17 murid.

Tabel 3.12. Rasio Murid-Guru Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan dan Pengelolanya (Kemenag), Tahun ajaran 2022/2023

Kab Kota	MI			MTs			MA		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
Kep. Seribu	11,12	-	11,12	5,49	-	5,49	-	-	-
Jakarta Selatan	14,17	15,30	15,18	15,51	10,82	12,04	14,71	9,17	11,33
Jakarta Timur	17,31	17,12	17,14	13,37	9,65	11,18	14,65	7,86	11,91
Jakarta Pusat	14,28	14,22	14,23	12,40	9,17	9,87	12,74	8,47	10,09
Jakarta Barat	18,31	20,78	20,60	14,96	13,06	13,68	12,70	9,77	11,39
Jakarta Utara	17,22	20,42	20,15	12,95	11,15	11,72	12,87	6,55	8,49
Jumlah	16,02	17,91	17,71	13,75	10,81	11,82	13,93	8,56	11,11

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk sekolah-sekolah yang berada dibawah kewenangan Kemenag, polanya relatif sama dengan sekolah di bawah Kemendikbudristek. Dimana semakin tinggi jenjang pendidikannya, rasio murid-guru semakin berkurang. Begitu pula dengan sekolah dibawah pengelola swasta, rasio murid-guru relative lebih rendah, kecuali pada jenjang MI.

3.3 Kecukupan Ruang Kelas dan Rasio Murid Kelas

Salah satu hal yang paling penting dalam proses belajar mengajar adalah tersedianya fasilitas belajar yang nyaman dan aman

bagi peserta didik. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah harus sesuai standar mutu pendidikan yang telah ditentukan, sehingga akan mendukung proses pembelajaran yang lebih kondusif.

Kesiapan ruang kelas pada pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan, baik dari segi kecukupan ataupun kondisinya. Pembelajaran tatap muka di daerah zona hijau dan kuning harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya adalah jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas untuk pendidikan dasar dan menengah adalah 18 anak dari standar 36 peserta didik. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan sistem rombongan belajar secara bergiliran (*shifting*) yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

Kondisi ruang kelas sekolah juga perlu mendapat perhatian selama pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Misalnya, kondisi sirkulasi udara dalam ruang kelas harus dalam keadaan baik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan aman. Sayangnya, pada tahun ajaran 2022/2023 ruang kelas yang ada masih didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak, baik rusak ringan/sedang maupun rusak berat/total. Berdasarkan data dari Kemendikbud, pada tahun ajaran 2022/2023 kondisi ruang kelas sekolah di DKI Jakarta pada setiap jenjangnya telah mengalami perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi ruang kelas pada tahun ajaran sebelumnya.

Selain rasio murid-guru, indikator murid-kelas juga dapat digunakan untuk menggambarkan ketersediaan dan kelayakan sarana pendidikan. Semakin kecil rasio murid-kelas, maka proses belajar mengajar dapat berjalan lebih baik, karena kepadatan murid dalam

kelas menjadi lebih kecil. Data ini dapat memberikan gambaran, rata-rata jumlah murid per kelas menurut jenjang pendidikan.

Tabel 3.13. Jumlah Kelas, rombongan Belajar, dan Rasio murid-Kelas Menurut Jenjang Pendidikan 2022/2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah Kelas	Jumlah Rombongan Belajar	Rasio Murid-Kelas	Rasio Murid-Rombel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD	27.989	28.219	27,34	27,11
SMP	6.718	6.060	27,78	32,07
SMU	12.590	10.906	28,27	31,33
SMK	8.089	6.764	24,23	28,97

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Tabel 3.13 memperlihatkan rasio murid-kelas tertinggi berada pada jenjang SMU, yaitu 28,27. Artinya dalam satu kelas dijenjang SMU, terdapat sekitar 28 murid. Pada jenjang SD rasio murid-kelas sebesar 27,34, artinya satu kelas SD rata-rata menampung sekitar 27 murid. Pada jenjang SMP rasio murid-kelas sebesar 27,78 dan pada jenjang SMK rasio murid-kelas sebesar 24,13. Ini berarti rata-rata siswa dalam setiap kelas di tingkat SMK lebih rendah dibandingkan di tingkat SMU.

Berbeda dengan rasio murid-kelas, rasio murid-rombongan belajar (rombel), rasio tertinggi berada pada jenjang SMP, yaitu 32,07. Artinya dalam satu kelas dijenjang SMP, terdapat sekitar 32 murid. Pada jenjang SD rasio murid-rombel sebesar 27,11, artinya satu kelas SD rata-rata menampung sekitar 27 murid. Pada jenjang SMU rasio murid-rombel sebesar 31,33 dan pada jenjang SMK rasio murid-rombel

sebesar 28,97. Ini berarti rata-rata siswa dalam setiap kelas di tingkat SMK lebih rendah dibandingkan di tingkat SMU.

3.4 Fasilitas Laboratorium dan Perpustakaan

Hal lain yang dapat menggambarkan kualitas Pendidikan di sekolah adalah Perpustakaan. Repositori Intitusi Kemendikbudristek juga merupakan sarana yang digunakan Perpustakaan Kemendikbudristek dalam mengumpulkan seluruh karya yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek agar dapat diakses secara luas dan mudah oleh publik. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Perpustakaan Kemendikbudristek sebagai perpustakaan khusus, sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Khusus yaitu sebagai pusat deposit di lingkungan lembaga induk. Pemanfaatan Repositori Intituti Kemendikbudristek secara daring diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan cepat, tepat, dan akurat serta sekaligus dapat meningkatkan visibilitas dan memberikan dampak positif bagi institusi Kemendikbudristek.

Begitu pula dengan Laboratorium, keberadaan laboratorium memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Laboratorium identik dengan suatu penelitian dan percobaan. Tidak hanya digunakan oleh para peneliti, keberadaan laboratorium juga ada di sekolah-sekolah untuk digunakan para siswa untuk melakukan uji coba atau eksperimen dalam bidang teknologi dan pengetahuan, khususnya pada mata pelajaran eksakta seperti fisika, biologi dan

kimia. Uraian berikut ini akan memberikan gambaran keberadaan perpustakaan dan laboratorium di masing-masing jenjang Pendidikan.

Tabel 3.14. Jumlah Laboratorium, Perpustakaan, dan Rasio Laboratorium-Sekolah, dan Rasio Perpustakaan-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan 2022/2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah Laboratorium	Jumlah Perpustakaan	Rasio Laboratorium-Sekolah	Rasio Perpustakaan-Sekolah
SD	1.352	2.079	0,6	0,93
SMP	484	484	0,92	0,98
SMU	990	1.056	0,98	0,98
SMK	1.145	559	2	0,98

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Dari Tabel 3.11 terlihat bahwa jumlah laboratorium di jenjang SD merupakan yang terbanyak, dibandingkan jenjang Pendidikan lainnya. Hal ini selaras dengan banyaknya jumlah sekolah SD yang memang terbanyak diantara jenjang Pendidikan lainnya. Jumlah laboratorium paling sedikit ada pada jenjang Pendidikan SMP. Pola yang sama terlihat pada keberadaan perpustakaan menurut jenjang Pendidikan, dimana jumlah perpustakaan terbanyak ada di jenjang SD, dan yang paling sedikit ada pada jenjang Pendidikan SMP.

Jika dilihat rasio laboratorium per sekolah, maka terlihat bahwa rasio terkecil ada pada jenjang SD, yakni sebesar 0,60. Artinya setiap 2 sekolah, yang satu memiliki laboratorium, yang satu sekolah lagi tidak memiliki laboratorium. Pada jenjang SMP dan SMU rasio laboratorium per sekolah masing-masing 0,92 dan 0,98. Artinya hamper semua sekolah di jenjang SMP dan SMU memiliki 1 lanatorium.

Untuk perpustakaan jumlah terbanyak ada pada jenjang SD Hal ini selaras dengan banyaknya jumlah sekolah SD yang memang terbanyak diantara jenjang Pendidikan lainnya. Jumlah perpustakaan paling sedikit ada pada jenjang pendidikan SMP. Rasio perpustakaan per sekolah, terlihat bahwa untuk seluruh jenjang Pendidikan relative sama, yakni berkisar antara 0,93 hingga 0,98. rasio terkecil ada pada jenjang SD, yakni sebesar 0,93. Artinya setiap satu sekolah pada seluruh jenjang Pendidikan rata-rata memiliki satu perpustakaan.

<https://jakarta.bps.go.id>

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB IV

PARTISIPASI SEKOLAH

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

APM SD/Sederajat

98,37

Sebanyak 98,37 persen penduduk **usia 7-12 tahun** di Jakarta bersekolah pada jenjang SD



APM SMP/Sederajat

84,22

Sebanyak 84,22 persen penduduk **usia 13-15 tahun** di Jakarta bersekolah pada jenjang SMP



APM SMA/Sederajat

60,88

Sebanyak 60,88 persen penduduk **usia 16-18 tahun** di Jakarta bersekolah pada jenjang SMA



<https://jakarta.bps.go.id>

B A B IV

PARTISIPASI SEKOLAH

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan. Negara dengan kualitas SDM yang baik akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk memenangkan persaingan di percaturan perekonomian global. Pendidikan merupakan salah satu pilar yang diperlukan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pembangunan bidang pendidikan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas SDM bangsa ini. Dalam menghadapi era globalisasi, SDM yang andal, tangguh, dan mampu berkompetisi dengan bangsa lain sangat diperlukan agar bangsa kita dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Peningkatan kualitas SDM melalui bidang pendidikan, diwujudkan pemerintah melalui berbagai kebijakan, antara lain pelaksanaan program wajib belajar (Wajar) 6 tahun yang telah dilaksanakan sejak tahun 1984, kemudian ditingkatkan dengan Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun pada tahun 1994. Dalam kurun waktu 2 dasawarsa, dampak positif dari program wajib belajar telah mampu mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi sekolah. Pada tahun 2012, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan kebijakan wajib belajar 12 tahun, yang artinya siswa SMA sederajat mendapat subsidi dari pemerintah dalam hal pembiayaan pendidikannya. Kebijakan ini diimplementasikan dengan kebijakan SPP gratis pada SMA sederajat negeri. Bahkan seluruh sekolah

Kebijakan ini berimplikasi pada semakin banyak penduduk yang mampu menamatkan pendidikan SD, dan secara tidak langsung turut

memberi kontribusi pada penundaan usia anak-anak dalam memasuki bursa lapangan pekerjaan. Melalui program ini diharapkan jumlah penduduk usia sekolah yang buta huruf semakin berkurang. Akhirnya, melalui pemerataan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

4.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Salah satu indikator pendidikan yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menggambarkan proporsi penduduk yang masih sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (misalnya SD) terhadap penduduk usia sekolah yang bersangkutan. Penduduk kelompok usia sekolah SD adalah 7-12 tahun, usia sekolah SLTP adalah 13-15 tahun dan usia sekolah SLTA adalah 16-18 tahun. Jika APS mencapai angka 100, artinya semua anak usia 7-12 tahun sudah berpartisipasi dalam pendidikan formal. Indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia yang potensial di masa datang. Semakin banyak penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan, peluang untuk meningkatkan kualitas SDM di masa datang juga semakin besar.

Dalam kurun waktu tahun 2021-2022, angka partisipasi sekolah penduduk DKI Jakarta secara umum cenderung menurun, baik pada perempuan maupun laki-laki. Keadaan ini nampaknya dipengaruhi situasi pandemi COVID-19. Namun demikian penurunannya relatif kecil, diharapkan dapat meningkatkan *human capital* bangsa ini di masa mendatang.

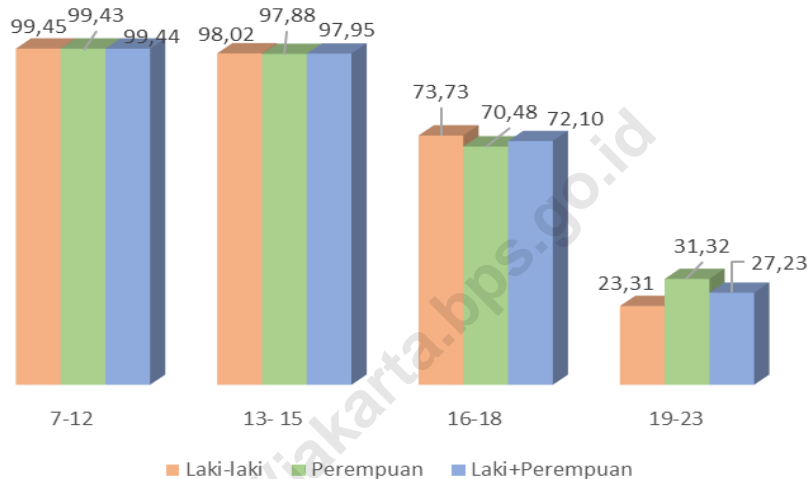
Pada Gambar 4.1 dapat dilihat selama kurun waktu Tahun 2021-2022, angka partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan

sedikit mengalami penurunan, kecuali jenjang Perguruan Tinggi. Pada tahun 2022 angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun sebesar 99,44 persen, turun 0,90 poin persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 99,53 persen. Sementara APS 13-15 tahun sebesar 97,95 persen turun 0,73 poin persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 98,68 persen. Begitu pula dengan APS kelompok usia 16-18 tahun juga menurun dari 72,32 persen menjadi 72,10 persen.

Pada jenjang Perguruan tinggi, APS mengalami peningkatan dari 26,91 persen di Tahun 2021 menjadi 27,23 persen pada Tahun 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan karena peningkatan yang cukup tajam pada APS perempuan, dimana kenaikannya mencapai sekitar 4 persen, yakni dari 27,49 persen menjadi 31,32 persen pada Tahun 2022.

Menurunnya APS pada seluruh kelompok usia sekolah dari 7-12 tahun hingga usia 16-18 tahun, kemungkinan masih dipengaruhi dampak pandemic COVID-19, dimana pada masa pemulihan di tahun 2022, beberapa siswa yang terbiasa menjalani pembelajaran jarak jauh (*school from home*) enggan melanjutkan sekolah. Namun demikian, kondisi ini diharapkan kembali pulih seperti sedia kala dengan berbagai program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digulirkan Pemerintah Pusat dan program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dikucurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan minat dan partisipasi anak untuk tetap bersekolah. Selain itu peran serta pihak swasta dan masyarakat dalam menunjang kegiatan pendidikan memberi kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat secara umum. Termasuk pula bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah digulirkan sejak tahun 2014. Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta juga telah menggulirkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) berupa bantuan untuk siswa miskin dan siswa yang berprestasi yang masih berjalan hingga saat ini. Gambaran visual secara rinci Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur menurut jenis kelamin di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.



Sumber : Susenas Maret, 2022

Gambar 4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Sekolah Menurut Jenis Kelamin, di DKI Jakarta, 2022

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, angka partisipasi sekolah terlihat semakin kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi penduduk yang kemampuan ekonominya terbatas, ada kecenderungan orangtua tidak menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa factor penyebabnya, antara lain adalah karena ketidakmampuan dalam pembiayaan pendidikan, di samping alasan lain seperti anak tidak minat sekolah, membantu mendapatkan penghasilan, biaya transportasi, dan sebagainya.

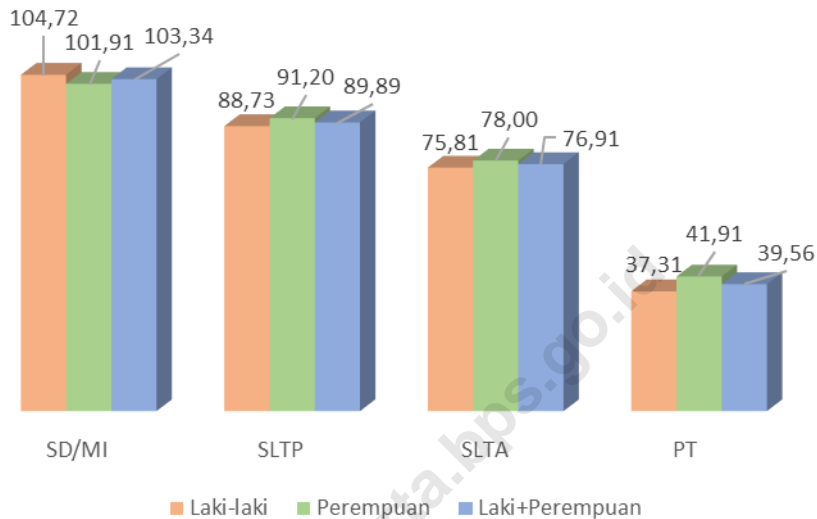
Differensiasi jenis kelamin memperlihatkan, APS perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan APS laki-laki pada setiap kelompok usia sekolah, kecuali pada jenjang Perguruan tinggi. Namun demikian, pada tahun 2021, APS perempuan pada umur 7-12 tahun lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki. Sebagai gambaran APS laki-laki untuk kelompok umur 7-12 tahun pada Tahun 2021 sebesar 98,45 persen, sementara perempuan mencapai 98,90 persen.

4.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator pendidikan lain yang biasa digunakan untuk mengukur partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Kasar/APK (*Gross Enrollment Ratio /GER*) dan Angka Partisipasi Murni/APM (*Net Enrollment Ratio /NER*). APK menggambarkan proporsi penduduk yang sekolah di jenjang pendidikan tertentu, misalnya SD (tanpa melihat usianya) terhadap total penduduk usia 7-12 tahun. Sementara APM merupakan proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sekolah di SD terhadap total penduduk usia 7-12 tahun. Artinya pada APM ingin melihat kesesuaian kelompok umur dengan jenjang sekolah yang diduduki. Penghitungan yang serupa dilakukan untuk mendapatkan APK dan APM di tingkat SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Kelompok usia sekolah yang digunakan adalah kelompok usia 13-15 tahun untuk jenjang SLTP sederajat dan usia 16-a8 tahun untuk jenjang SLTA sederajat.

Gambar 4.2 menyajikan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di DKI Jakarta dan jenis kelamin pada Tahun 2022. Dari Gambar 4.2. tampak bahwa APK untuk laki-laki dan perempuan memiliki pola yang relatif sama, yaitu semakin tinggi jenjang pendidikan

semakin rendah APKnya. Namun demikian, terdapat kecenderungan APK perempuan selalu lebih rendah dibandingkan APK laki-laki.



Sumber: Susenas Maret, 2022

Gambar 4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, di DKI Jakarta, 2022

Sama halnya dengan Angka Partisipasi Sekolah, APK pada jenjang Perguruan Tinggi juga menunjukkan bahwa pada Tahun 2022, APK perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan APK laki-laki. Kemungkinan penyebabnya adalah, pada saat pandemic dengan penerapan *school from home* pada metode pembelajaran di seluruh jenjang Pendidikan, perempuan masih dapat mengerjakan kegiatan domestiknya dan ingin memanfaatkan waktunya untuk dapat melanjutkan Pendidikan dengan tetap menjalankan fungsi domestiknya.

Secara umum APK untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2022 sebesar 103,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk

yang bersekolah di SD lebih banyak dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun, bisa jadi di bawah usia 7 tahun atau di atas 12 tahun. Secara faktual kondisi ini memang cukup banyak ditemui, dimana anak di bawah usia 7 tahun, sudah bersekolah di jenjang SD. Begitu pula dengan anak di atas usia 12 tahun, faktanya masih ada yang masih bersekolah di SD, baik karena alasan mengulang maupun karena terlambat masuk sekolah. Dari sini tampak bahwa masih ada sekolah-sekolah swasta yang menerima murid SD di bawah usia 7 tahun, namun dengan syarat-syarat tertentu, misalnya sudah pernah sekolah di prasekolah (PAUD, TK, dan sejenisnya), mampu bersosialisasi, dan ketentuan lainnya.

Perbedaan jenis kelamin menunjukkan, APK laki-laki pada jenjang SD lebih besar dibandingkan APK SD pada perempuan. APK SD laki-laki sebesar 104,72 persen, sedangkan APK SD perempuan sebesar 101,91 persen. Perbedaan ini tidak signifikan, hanya terpaut 2,81 persen poin.

Pada jenjang pendidikan SLTP, secara umum APK pada tahun 2022 sebesar 89,89 persen, angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 91,56 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, APK SLTP untuk laki-laki sebesar 88,73 persen, sedangkan APK perempuan sebesar 91,20 persen. Atau dengankata lain persentase muris SLTP yang usianya di luar rentang usia 13 sampai 15 tahun, lebih banyak ditemui pada laki-laki dibandingkan perempuan.

Pada jenjang SLTA, secara umum APK SLTA lebih rendah dibandingkan APK SD dan SLTP, yakni sebesar 76,91 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, APK untuk SLTA mengalami sedikit penurunan, yaitu dari 77,08 persen menjadi 76,19 persen. Jika diamati menurut jenis kelamin, terlihat APK SLTA pada laki-laki lebih

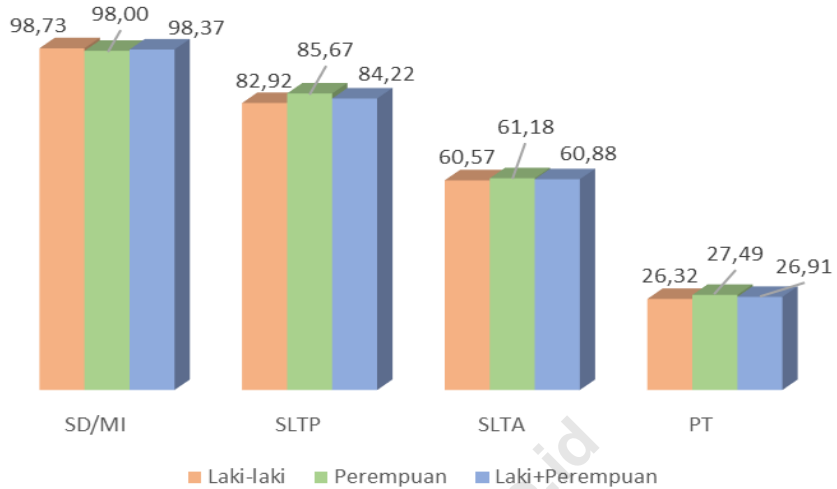
rendah daripada APK perempuan, APK SLTA untuk laki-laki sebesar 75,81 persen, sedangkan APK SLTA untuk perempuan sebesar 78,00 persen.

Rendahnya APK di jenjang SLTP dan SLTA dibandingkan APK jenjang SD menunjukkan bahwa pada jenjang SLTP, banyak lulusan SD yang terpaksa tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu pula pada jenjang SLTA, banyak lulusan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA. Kondisi ini terjadi diantaranya karena kesulitan biaya, kurangnya minat anak untuk bersekolah, dan alasan lainnya.

Pada jenjang Perguruan Tinggi, pada Tahun 2022 APK secara umum sebesar 39,56 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APK pada tahun 2021 yang mencapai 40,05 persen. Penurunan ini terutama terjadi sebagai dampak dari penurunan APK pada laki-laki, yakni dari 40,14 persen turun menjadi 37,31 persen. Hal sebaliknya terjadi pada APK perempuan di Perguruan tinggi yang justru mengalami peningkatan dari 32,36 persen meningkat tajam menjadi 41,91 persen, atau terjadi kenaikan sekitar 9 persen.

4.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) memiliki pola yang relatif sama dengan APK, artinya di jenjang SD APM lebih tinggi dibandingkan APM pada jenjang SLTP dan SLTA. Hingga PT. Angka Partisipasi Murni SD pada tahun 2022 sebesar 98,37 persen, angka ini naik sedikit dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 98,22 persen. APM SD pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan APM perempuan, namun kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2021.



Sumber: Susenas Maret, 2022

Gambar 4.3. Angka Partisipasi Kasar (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2022

APM SLTP pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan, dari 83,01 persen pada tahun 2021 menjadi 84,22 persen pada tahun 2022. Begitu pula pada jenjang SLTA, APM mengalami kenaikan dari 60,53 persen pada tahun 2021 menjadi 60,88 persen pada tahun 2022. Jika diamati menurut jenis kelamin, baik pada jenjang SLTP maupun SLTA, APM laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan APM perempuan.

Pada jenjang Perguruan Tinggi, APM masih relatif rendah dibandingkan jenjang pendidikan dibawahnya, yaitu sebesar 21,49 persen. Namun demikian APM untuk Perguruan tinggi sudah mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 dari 25,18 persen naik menjadi 26,91 persen dan tahun 2022. Sama halnya dengan APS, dan APK, APM pada perguruan

tinggi lebih tinggi pada perempuan dibandingkan dengan APM pada laki-laki.

Rendahnya APM pada usia 19-24 tahun pada umumnya dipengaruhi oleh masuknya penduduk usia ini pada pasar kerja, yaitu sebagai angkatan kerja. Selain itu pada perempuan, usia 19-24 ada yang memilih membina rumah tangga, sehingga tidak melanjutkan pendidikannya.

Perbedaan nilai antara APK dengan APM menunjukkan ada sejumlah penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu, misalnya SD, yang usianya di luar usia 7-12 tahun. Begitu pula untuk tingkat SLTP, ada yang bersekolah pada jenjang ini yang usianya diluar kelompok usia 13 – 15 tahun. Hal yang sama juga terjadi pada jenjang pendidikan SLTA. Hal ini memberikan indikasi bahwa masih ada siswa yang berusia lebih tua dan yang berusia lebih muda dari kelompok usia yang semestinya dalam setiap jenjang pendidikan (*overage dan underage*). Hal ini dapat terjadi, antara lain karena banyak keluarga kurang mampu yang terlambat menyekolahkan anaknya. Sebagai gambaran, banyak keluarga tak mampu yang menunda menyekolahkan anaknya, walaupun anak tersebut telah memasuki usia sekolah, karena alasan ekonomi. Sehingga masih cukup banyak anak usia di atas 12 tahun yang masih sekolah di SD. Kondisi ini yang mempengaruhi naik turunnya persentase APK dan APM.

BAB V

KEGIATAN PESERTA DIDIK

Penggunaan Komputer



Sebanyak **30,21** persen penduduk yang masih sekolah di Jakarta menggunakan komputer (PC, Laptop, atau tablet)

Penggunaan Internet

Sebanyak **78,95** persen penduduk yang masih sekolah di Jakarta menggunakan komputer (PC, Laptop, atau tablet)



Penggunaan Internet Menurut Media yang digunakan



2,64%



18,38%



1,64%



76,89%

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB V

KEGIATAN PESERTA DIDIK

Peserta didik yang dimaksud pada bagian ini adalah penduduk yang masih mempunyai status sekolah, atau terdaftar dan aktif pada jenjang pendidikan baik formal maupun informal. Jenjang pendidikan formal meliputi sekolah negeri maupun swasta dimulai dari Sekolah Dasar (SD) dan sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat), sampai dengan jenjang pendidikan tinggi baik Diploma maupun Sarjana. Sedangkan jenjang pendidikan informal meliputi kelompok belajar Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA, baik negeri maupun swasta. Pembahasan tidak didasarkan pada umur atau usia sekolah.

Untuk menunjang kegiatan sekolah atau dalam rangka aktifitas sehari-hari pada umumnya penduduk secara keseluruhan melakukan akses terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada umumnya mereka mengakses internet untuk berbagai keperluan termasuk dalam rangka pembelajaran maupun hal lain diluar kegiatan sekolah. Selain kegiatan sekolah yang merupakan kewajiban bagi seorang siswa atau peserta didik, terkadang mereka melakukan kegiatan lain diluar sekolah seperti membantu orang tua di rumah, kursus, dan bahkan mungkin kegiatan bekerja. Kedua hal tersebut akan dibahas pada bagian ini.

5.1 Akses Terhadap Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Istilah teknologi informasi sudah tidak asing lagi di telinga kita saat ini. Melalui teknologi informasi manusia dapat diperoleh informasi

yang diinginkan atau dengan istilah lain teknologi yang merupakan alat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Istilah teknologi informasi seringkali dikaitkan atau identic dengan perangkat komputer/PC, laptop, *smartphone*, *smartwatch*, tablet, dan lain sebagainya. Pembahasan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini akan dikaitkan dengan penggunaan HP atau telepon seluler, penggunaan komputer, dan juga akses internet.

Telepon seluler atau lebih dikenal dengan istilah HP saat ini bukan merupakan barang mewah lagi karena hampir setiap orang telah menggunakan telepon selular. Hasil Susenas Maret 2022 lalu menunjukkan bahwa persentase penduduk DKI Jakarta usia 5 tahun ke atas yang menggunakan HP mencapai 87,84 persen. Hanya kurang lebih 12 persen penduduk usia 5 tahun ke atas yang sampai dengan tahun 2022 belum menggunakan HP.

Tabel 5.1. Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota di DKI Jakarta, 2022

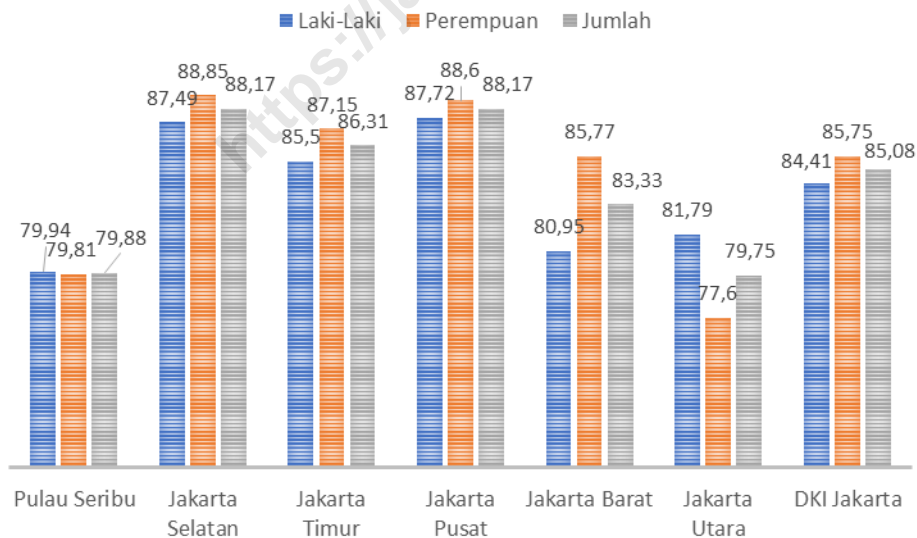
Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pulau Seribu	83,88	76,45	80,18
Jakarta Selatan	90,34	87,51	88,93
Jakarta Timur	91,17	87,57	89,38
Jakarta Pusat	91,08	85,96	88,56
Jakarta Barat	89,20	84,68	86,95
Jakarta Utara	87,89	82,11	85,03
DKI Jakarta	89,91	85,74	87,84

Sumber : Susenas Maret, 2022

Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang menggunakan HP hampir merata di setiap kabupaten/kota di DKI Jakarta seperti ditunjukkan oleh Tabel 5.1. Penggunaan berkisar antara 80 persen

sampai dengan 89 persen penduduk, dengan persentase terendah di Kabupaten Kepulauan Seribu (80,18 %) dan tertinggi di Kota Jakarta Timur (89,38 %). Kota lain umumnya sudah di atas 85 persen pemakaian.

Persentase pemakaian HP oleh siswa atau peserta didik di DKI Jakarta menunjukkan bahwa sekitar 85 persen peserta didik menggunakan HP pada tahun 2022. Persentase pemakaian berkisar antara 80 persen sampai dengan 88 persen. Persentase peserta didik menggunakan HP di Pulau Seribu hampir sama dengan di Jakarta Utara, yaitu masing-masing 79,88 persen dan 79,75 persen. Sementara itu persentase pemakaian tertinggi adalah peserta didik di Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang masing-masing mencapai 88,17 persen dari seluruh peserta didik (Gambar 5.1).



Sumber: Susenas Maret, 2022

Gambar 5.1. Persentase Penduduk yang Masih Sekolah yang Menggunakan Telepon Seluler Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Penduduk 5 tahun ke atas yang menggunakan HP lebih banyak pada jenis kelamin laki-laki (89,91 %) dibandingkan perempuan (85,74 %), sebaliknya persentase penggunaan HP oleh peserta didik perempuan lebih tinggi (85,75 %) dibandingkan laki-laki (84,41 %). Secara keseluruhan persentase penggunaan HP oleh peserta didik di DKI Jakarta pada tahun 2022 mencapai 85,08 persen. Ternyata tidak seluruh peserta didik telah menggunakan HP, masih ada sekitar 15 persen peserta didik yang tidak menggunakannya.

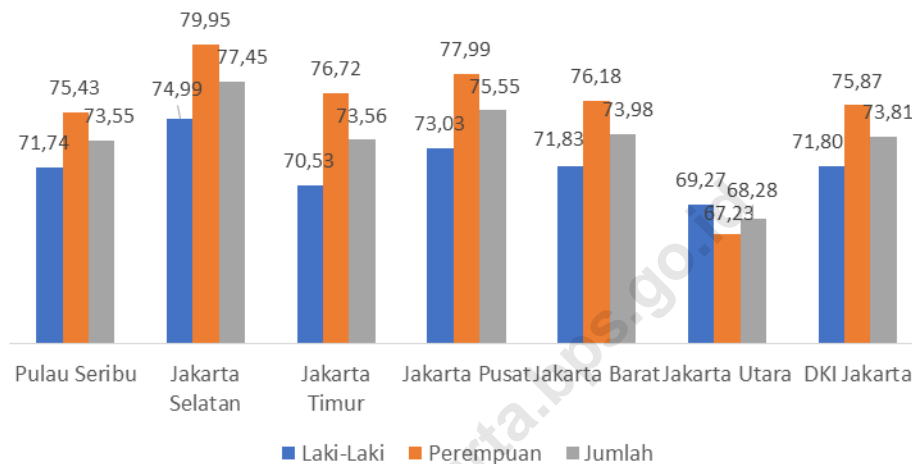
Tabel 5.2. Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pulau Seribu	78,24	71,02	74,65
Jakarta Selatan	84,70	82,13	83,42
Jakarta Timur	85,04	81,96	83,51
Jakarta Pusat	85,68	79,71	82,74
Jakarta Barat	85,42	78,30	81,87
Jakarta Utara	82,73	75,81	79,30
DKI Jakarta	84,70	79,82	82,27

Sumber : Susenas Maret, 2022

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022 persentase penduduk 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki HP mencapai 82,27 persen, dengan persentase laki-laki lebih tinggi (84,70 %) dibandingkan perempuan (79,82%) (Tabel 5.2). Berbeda dengan kondisi peserta didik, persentase penguasaan/kepemilikan HP baru mencapai 73,81 persen dengan rincian perempuan lebih tinggi (75,87 %) dibandingkan laki-laki (71,80 %) (Gambar 5.2). Persentase penduduk masih sekolah yang mempunyai/menguasai HP tertinggi terdapat di

Kota Jakarta Selatan (77,45 %), disusul oleh Jakarta Pusat (75,55 %), dan Jakarta Barat (73,98 %). Persentase penduduk masih sekolah memiliki HP terendah di Kota Jakarta Utara yaitu 68,28 persen.



Sumber: Susenas Maret, 2022

Gambar 5.2. Persentase Penduduk yang Masih Sekolah yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Penggunaan teknologi informasi oleh peserta didik menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan dalam rangka proses pembelajaran terutama di masa pandemi COVID-19. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko penularan virus, sehingga selama masa pandemi COVID-19 pembelajaran dilakukan tanpa tatap muka melainkan secara *online*. Pembelajaran secara online umumnya dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan HP. Setelah masa pandemi COVID-19 berlalu dan pembelajaran kembali dilakukan secara tatap muka, penggunaan HP oleh peserta didik tidak serta merta dihentikan. Beberapa kegiatan masih dilakukan dengan

menggunakan HP seperti mencari bahan pembelajaran, mengerjakan tugas, grup kelas, mengumpulkan tugas, dan lain sebagainya.

Teknologi informasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan HP saja, termasuk di dalamnya penggunaan perangkat komputer. Baik komputer mau HP keduanya memiliki persamaan antara lain dapat digunakan untuk browsing internet, menginstall aplikasi tertentu, menyimpan data, serta menyimpan data dan lain sebagainya, tetapi masing-masing mempunyai kapasitas dan kemampuan yang berbeda.

Tabel 5.3. Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Komputer*) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

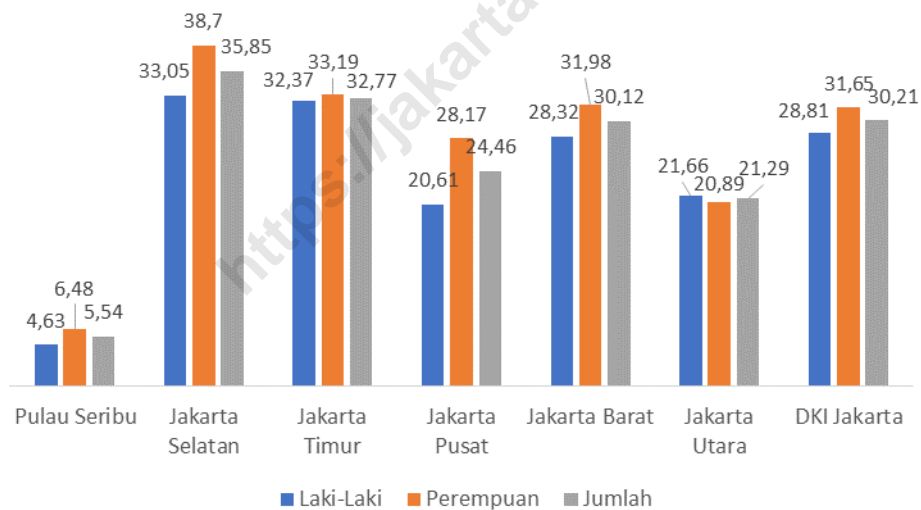
Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pulau Seribu	9,74	9,45	9,59
Jakarta Selatan	29,04	25,73	27,39
Jakarta Timur	27,55	23,59	25,57
Jakarta Pusat	20,65	19,70	20,18
Jakarta Barat	24,95	21,96	23,46
Jakarta Utara	19,14	15,40	17,29
DKI Jakarta	25,14	21,88	23,52

Sumber: Susenas Maret, 2022

*) Komputer meliputi PC/Desktop, Laptop/Notebook, dan Tablet

Penggunaan komputer penduduk DKI Jakarta pada tahun 2022 menunjukkan bahwa belum ada seperempat penduduk DKI Jakarta yang menggunakan komputer (23,52 %). Penggunaan komputer penduduk 5 tahun ke atas berkisar antara 9,59 % (Kabupaten Kepulauan Seribu) sampai dengan 27,39 persen (Jakarta Selatan). Diluar Pulau Seribu penggunaan komputer oleh penduduk 5 tahun ke atas telah di atas 20 persen kecuali di Kota Jakarta Utara (17,29 %) (Tabel 5.3).

Pada tahun 2022 penggunaan komputer oleh peserta didik di DKI Jakarta baru mencapai 30,21 persen dari total peserta didik. Meskipun demikian penggunaan komputer sudah merata di semua wilayah di DKI Jakarta. Persentase peserta didik terendah di Kabupaten Kepulauan Seribu yaitu 5,54 persen dan tertinggi di Kota Jakarta Timur mencapai 35,85 persen. Di wilayah kota penggunaan komputer oleh peserta didik sudah di atas 30 persen kecuali Jakarta Utara (21,29 %) dan Jakarta Pusat (24,46 %) (Gambar 5.3). Penggunaan komputer oleh peserta didik mempunyai persentase lebih kecil dibandingkan HP mengingat tidak semua peserta didik mampu membeli komputer yang harganya yang relatif lebih mahal.



Sumber: Susenas Maret, 2022

*) Komputer meliputi PC/Desktop, Laptop/Notebook, dan Tablet

Gambar 5.3. Persentase Penduduk Masih Sekolah Menurut yang Menggunakan Komputer*) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Penggunaan komputer oleh peserta didik menurut jenis kelamin menunjukkan kecenderungan perempuan lebih tinggi dibandingkan

laki-laki. Pada tahun 2022 persentase peserta didik perempuan menggunakan komputer sebesar 31,65 persen dan laki-laki sebesar 28,81 persen. Apabila dicermati menurut wilayah tampak adanya pola yang sama, kecuali di Kota Jakarta Utara persentase peserta didik perempuan lebih sedikit (20,89 %) dibandingkan peserta didik laki-laki (21,66 %).

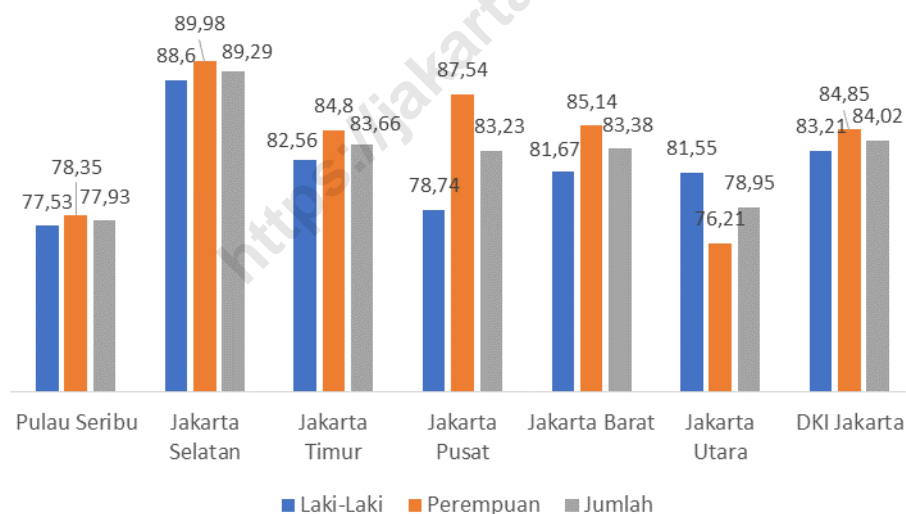
Pembahasan mengenai teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa dipisahkan dengan penggunaan internet. Internet dapat dikatakan sebagai puncak perkembangan teknologi informasi, karena melalui internet manusia dapat melakukan berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari dengan sangat mudah. Dengan internet manusia dapat berkomunikasi ke segala penjuru dunia dengan mudah, berbelanja, bekerja, belajar, dan lain sebagainya.

Penduduk DKI Jakarta umur 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet pada tahun 2022 mencapai 84,65 persen, tersebar di semua wilayah dengan persentase terendah di Kabupaten Kepulauan Seribu (74,29 %) dan tertinggi di Kota Jakarta Selatan (87,31 %). Selain Kepulauan Seribu, penggunaan internet di semua wilayah sudah di atas 80 persen. Menurut jenis kelamin tampak bahwa persentase penggunaan internet penduduk laki-laki lebih besar (87,10 %) dibandingkan perempuan (82,18 %). Bahkan di Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Timur penggunaan internet penduduk laki-laki hampir mencapai 90 persen (Tabel 5.4).

Tabel 5.4. Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas yang Pernah Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Kabupaten/Kota (1)	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
Pulau Seribu	77,70	70,84	74,29
Jakarta Selatan	88,51	86,11	87,31
Jakarta Timur	88,55	84,99	86,78
Jakarta Pusat	84,72	79,26	82,03
Jakarta Barat	87,01	80,00	83,52
Jakarta Utara	84,45	77,49	81,00
DKI Jakarta	87,10	82,18	84,65

Sumber: Susenas Maret, 2022



Sumber: Susenas Maret, 2022

Gambar 5.4. Persentase Penduduk Masih Sekolah yang Pernah Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Penggunaan internet oleh peserta didik di DKI Jakarta tahun 2022 mencapai 84,02 persen dengan rincian laki-laki 83,21 persen dan

perempuan 84,85 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kota Jakarta Selatan yaitu sebanyak 89,29 persen peserta didik pernah mengakses internet. Seluruh wilayah mempunyai persentase peserta didik pernah mengakses internet di atas 83 persen, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu (77,93 %) dan Kota Jakarta Utara (78,95 %) (Gambar 5.4).

Sejalan dengan tingginya persentase kepemilikan HP oleh peserta didik, akses internet dengan menggunakan media HP oleh peserta didik menempati urutan pertama dibandingkan dengan media lainnya. Lebih dari tiga perempat (76,89 %) peserta didik di DKI Jakarta pernah mengakses internet pada tahun 2022. Media lain yang banyak digunakan untuk mengakses internet adalah laptop/*note book* yang digunakan sekitar 18,38 % peserta didik. Akses internet menggunakan *Personal Computer/desktop* serta tablet masing-masing sebesar 2,64 persen dan 1,64 persen (Tabel 5.5).

Tabel 5.5. Persentase Penduduk Masih Sekolah yang Pernah Mengakses Internet Menurut Media yang Digunakan dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Kabupaten/ Kota	PC/ <i>Desktop</i>	Laptop / <i>Note Book</i>	Tablet	HP/ Ponsel	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pulau Seribu	-	2,87	1,00	95,26	0,86
Jakarta Selatan	1,67	19,01	1,68	76,79	0,85
Jakarta Timur	1,48	22,82	1,84	73,42	0,44
Jakarta Pusat	4,16	13,03	1,44	81,36	-
Jakarta Barat	3,96	17,96	1,54	76,42	0,12
Jakarta Utara	3,80	11,38	1,40	82,81	0,61
DKI Jakarta	2,64	18,38	1,64	76,89	0,45

Sumber: Susenas Maret, 2022

Tabel 5.5 juga menunjukkan bahwa akses internet peserta didik menggunakan HP terjadi di semua wilayah di DKI Jakarta, tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Seribu. Selain HP peserta didik di wilayah ini juga pernah mengakses internet menggunakan tablet dan laptop/*note book*, tetapi tidak ada yang menggunakan PC/*desktop*.

Akses internet memungkinkan seseorang terhubung dengan orang lain dimanapun berada sehingga dunia terasa tiada batas. Akses internet pada umumnya selain di lakukan di rumah sendiri, dapat dilakukan juga di tempat bekerja, tempat sekolah (kampus), maupun di tempat umum. Bahkan terkadang akses internet dilakukan pada kondisi bergerak misalnya dalam perjalanan menuju suatu tempat. Tabel 5. 10 menunjukkan bahwa persentase peserta didik yang pernah mengakses internet paling banyak dilakukan di rumah sendiri (44,81 %). Selanjutnya akses internet juga dilakukan oleh peserta didik ketika berada di tempat umum (19,32 %), dalam kondisi bergerak (12,84 %), bukan di rumah sendiri (8,44 %), dan ketika peserta didik berada di kampus atau sekolah (3,15 %) (Tabel 5.6).

Persentase peserta didik mengakses internet dari rumah menurut wilayah berkisar antara 41 – 52 persen, tertinggi di Kota Jakarta Utara (52,13 %) dan terendah di Kota Jakarta Timur (40,31 %). Persentase peserta didik mengakses internet di gedung sekolah/kampus pada tahun 2022 termasuk rendah, bisa jadi disebabkan karena pembelajaran sudah dilakukan sepenuhnya secara tatap muka. Setelah pembelajaran tatap muka, tidak seluruh sekolah mewajibkan peserta didik untuk mengakses internet misalnya pada tingkatan Sekolah Dasar.

Tabel 5.6. Persentase Penduduk Masih Sekolah yang Pernah Mengakses Internet Menurut Lokasi Mengakses Internet dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Kabupaten/Kota	Rumah Sendiri	Bukan Rumah Sendiri	Gedung Sekolah/ Kampus	Tempat Umum	Kondisi Bergerak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pulau Seribu	41,38	9,42	1,65	11,52	20,65
Jakarta Selatan	49,62	6,48	3,15	19,84	12,86
Jakarta Timur	40,31	9,71	4,02	17,53	14,07
Jakarta Pusat	43,02	5,91	2,00	23,80	17,76
Jakarta Barat	43,37	11,41	2,74	19,05	11,46
Jakarta Utara	52,13	4,37	2,51	20,80	9,11
DKI Jakarta	44,81	8,44	3,15	19,32	12,84

Sumber: Susenas Maret, 2022

Akses internet yang dilakukan peserta didik dalam kondisi bergerak paling besar terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, mencapai 20,65 persen. Sementara di wilayah lain jumlahnya di bawah 20 persen, tertinggi di Kota Jakarta Pusat (17,76 %) dan terendah di Kota Jakarta Utara (9,11 %). Akses internet dalam kondisi bergerak dimungkinkan ketika pengakses berada di kendaraan atau angkutan atau moda transportasi yang bergerak.

Tujuan mengakses internet yang dilakukan peserta didik antara lain untuk melakukan pembelajaran secara online (22,74 %), mendapatkan informasi/berita (19,52 %), kegiatan terkait media sosial (medsos) dan jejaring sosial (19,18 %). Saat ini media sosial dan jejaring sosial sudah menjadi bagian hari kehidupan sehari-hari. Beberapa orang termasuk peserta didik terbiasa menggunakan face book, twitter, Instagram, skype untuk bermedsos ria. Jejaring sosial juga digunakan menggunakan internet seperti WhatsApp (WA) yang

hampir digunakan semua orang, telegram, dan aplikasi jejaring sosial lainnya.

Internet juga biasa digunakan untuk mendapatkan hiburan bagi sebagian orang termasuk kalangan peserta didik. Peserta didik yang mengakses internet untuk mendapatkan hiburan sekitar 19 persen. Hiburan yang dapat menggunakan internet ada bermacam-macam misalnya you tube, tik tok, short, film pendek, dan lain sebagainya.

Internet juga digunakan untuk kepentingan lain seperti mengirimkan/menerima email (4,79 %), pembelian barang/jasa (4,69 %), dan mendapatkan informasi/berita (4,49 %). Sebagian peserta didik juga menggunakan internet untuk penjualan barang dan jasa (0,54 %), fasilitas finansial (1,80 %), serta untuk *Work From Home* (WFH) bagi peserta didik yang selain belajar juga bekerja. Maraknya konten digital membuat internet juga dimanfaatkan untuk pembuatan konten digital oleh peserta didik. Persentase peserta didik menggunakan internet untuk pembuatan konten digital sebesar 0,55 persen.

Penggunaan internet oleh peserta didik menurut kabupaten/kota pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pada pembelajaran online terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu yaitu 15,80 persen, sementara di wilayah kota berkisar antara 20 hingga 25 persen. Hal ini wajar mengingat wilayah Kepulauan Seribu merupakan area yang kecil dan cenderung lebih tertutup sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan dengan penularan virus.

Tabel 5.7. Persentase Penduduk Masih Sekolah yang Pernah Mengakses Internet Menurut Tujuan Akses Internet dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Kabupaten/ Kota	Mendapat kan Infomasi/ Berita	Mendapat kan Informasi Barang/ Jasa	Mengirim/ Menerima Email	Media Sosial /Jejaring Sosial	Pembe lian Barang/ Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pulau Seribu	22,74	4,89	3,64	15,69	7,65
Jakarta Selatan	19,11	4,68	5,42	17,53	4,72
Jakarta Timur	19,17	5,25	5,01	18,78	6,09
Jakarta Pusat	22,09	4,65	5,92	17,86	4,08
Jakarta Barat	18,81	3,93	4,53	21,58	3,38
Jakarta Utara	20,83	3,05	2,83	19,75	3,68
DKI Jakarta	19,52	4,49	4,79	19,18	4,69

Sumber: Susenas Maret, 2022

Sambungan Tabel 5.7

Kabupaten/ Kota	Penjualan Barang/ Jasa	Fasilitas Finansial	Pembel ajaran Online	WFH	Hibu- ran	Pembu atan Konten Digital	Lain nya
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pulau Seribu Jakarta	2,22	0,49	15,80	0,92	19,56	2,67	3,73
Selatan	0,18	1,81	24,58	1,45	18,58	0,36	1,58
Jakarta Timur	0,85	2,07	20,43	1,68	18,80	0,74	1,12
Jakarta Pusat	1,05	1,76	19,96	2,26	19,30	0,24	0,82
Jakarta Barat	0,42	1,73	23,29	1,16	19,98	0,60	0,60
Jakarta Utara	0,30	1,25	26,30	1,90	18,31	0,50	1,29
DKI Jakarta	0,54	1,80	22,74	1,57	19,00	0,55	1,11

Sumber: Susenas Maret, 2022

Penggunaan internet oleh peserta didik untuk kegiatan lain seperti penjualan barang/jasa, pembelian barang/jasa, serta pembuatan konten digital paling tinggi juga di Kabupaten Kepulauan Seribu. Untuk penjualan barang dan jasa mencapai 2,22 persen

sementara di wilayah lain paling tinggi hanya satu persen. Pembelian barang dan jasa oleh peserta didik mencapai 7,65 persen lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain yang umumnya berkisar tiga sampai enam persen. Pembuatan konten digital mencapai 2,65 persen sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah lain yang umumnya dibawah satu persen.

5.2 Aktifitas Peserta Didik Selain Sekolah

Peserta didik yang dimaksud pada pembahasan ini adalah mereka yang masih berstatus sekolah atau masih terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Pembahasan status sekolah pada bagian ini tidak dikaitkan dengan umur peserta didik, berapapun umurnya yang penting masih berstatus sekolah.

Peserta didik ada yang mempunyai kegiatan utama hanya bersekolah saja dan tidak mengerjakan kegiatan lain selain sekolah. Tetapi terdapat sejumlah peserta didik yang selain bersekolah mereka juga melakukan kegiatan bekerja, mengurus rumah tangga, dan bahkan melakukan kegiatan lain seperti berolah raga, kursus, atau kegiatan positif lainnya.

Jumlah peserta didik yang hanya melakukan kegiatan sekolah sebesar 90,19 persen, dengan persentase tertinggi berada di Kota Jakarta Utara (93,41 %) dan terendah di Kabupaten Kepulauan Seribu (86,76 %). Hanya sekitar 5,42 persen peserta didik yang selain sekolah juga melakukan kegiatan mencari penghasilan/nafkah. Persentase peserta didik bekerja menurut wilayah bervariasi antar wilayah, antara

tiga sampai delapan persen. Persentase peserta didik bekerja tertinggi di Kota Jakarta Timur yaitu 7,81 persen (Tabel 5.8)

Tabel 5.8. Persentase Penduduk Masih Sekolah Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Kabupaten/Kota	Bekerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Kegiatan Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pulau Seribu	4,35	86,76	2,84	6,05
Jakarta Selatan	4,67	92,45	1,01	1,87
Jakarta Timur	7,81	84,90	2,96	4,33
Jakarta Pusat	3,64	93,05	1,80	1,51
Jakarta Barat	5,23	91,83	1,31	1,63
Jakarta Utara	3,10	93,41	0,66	2,83
DKI Jakarta	5,42	90,19	1,69	2,70

Sumber: Susenas Maret, 2022

Peserta didik yang melakukan kegiatan bekerja sebagian besar masih berstatus sekolah pada jenjang pendidikan tinggi atau D3 ke atas, jumlahnya mencapai 79,81 persen. Dari jumlah tersebut sebagian besar berada pada jenjang pendidikan S1 mencapai 75,84 persen, disusul jenjang pendidikan S2 sebesar 2,34 persen, serta D3 sebesar 1,02 persen. Terdapat peserta didik bekerja pada saat menempuh jenjang pendidikan S3 tetapi jumlahnya sangat kecil hanya 0,61 persen.

Peserta didik yang melakukan kegiatan bekerja pada jenjang pendidikan menengah seluruhnya sebesar 20,19 persen, paling besar berada pada jenjang pendidikan Paket C. Seperti diketahui bersama jenjang pendidikan Paket C memang diperuntukkan bagi mereka yang tidak bisa mengenyam pendidikan menengah formal karena terbentur

usia. Umumnya mereka telah bekerja tetapi berusaha menyelesaikan pendidikan tingkat menengahnya. Jumlah peserta didik yang melakukan kegiatan bekerja dan menempuh pendidikan Paket C mencapai 11,79 persen. Mereka yang melakukan kegiatan bekerja dan berstatus sekolah di Paket A mencapai 4,34 persen, SMA sebesar 2,66 persen, dan SMP sebesar 1,40 persen.

Tabel 5.9. Persentase Penduduk Masih Sekolah yang Melakukan Kegiatan Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan yang Saat ini Sedang Diikuti dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Kabupaten/ Kota	Paket B	SMP	Paket C	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pulau Seribu	0,00	0,00	38,57	30,01
Jakarta Selatan	3,38	0,00	0,00	0,00
Jakarta Timur	3,46	0,00	14,22	5,01
Jakarta Pusat	13,91	13,44	12,89	5,61
Jakarta Barat	3,46	0,00	21,19	0,00
Jakarta Utara	7,03	7,27	0,00	1,04
DKI Jakarta	4,34	1,40	11,79	2,66

Lanjutan Tabel 5.9

Kabupaten/ Kota	D3	S1	S2	S3	S3
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pulau Seribu	0,00	31,42	0,00	0,00	100,00
Jakarta Selatan	0,00	96,62	0,00	0,00	100,00
Jakarta Timur	0,00	70,59	5,34	1,39	100,00
Jakarta Pusat	18,53	35,62	0,00	0,00	100,00
Jakarta Barat	0,00	75,35	0,00	0,00	100,00
Jakarta Utara	0,00	84,66	0,00	0,00	100,00
DKI Jakarta	1,02	75,84	2,34	0,61	100,00

Sumber: Susenas Maret, 2022

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB VI

HASIL DAN CAPAIAN PROSES PENDIDIKAN

Angka Melek Huruf Latin

99,22%

penduduk 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis huruf latin/alfabet

Angka Melek Huruf Arab/Hijaiyah

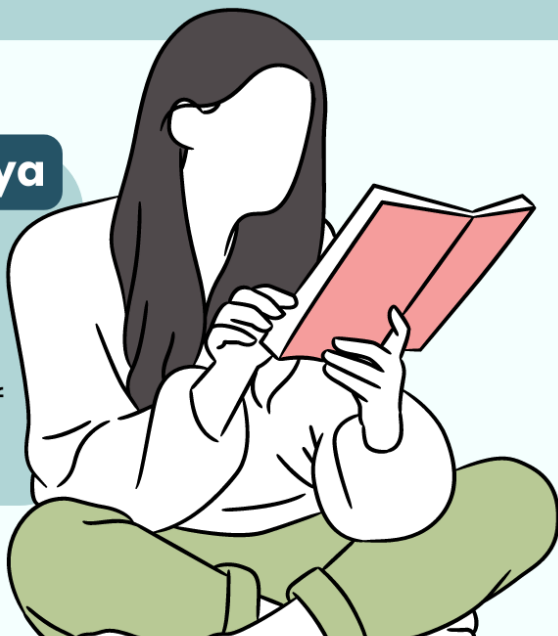
70,85%

penduduk 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis huruf arab/hijaiyah

Angka Melek Huruf lainnya

11,97%

penduduk 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis huruf lainnya (Kanji, Jawa, Mandarin, dsb)



<https://jakarta.bps.go.id>

BAB VI

HASIL CAPAIAN PROSES PENDIDIKAN

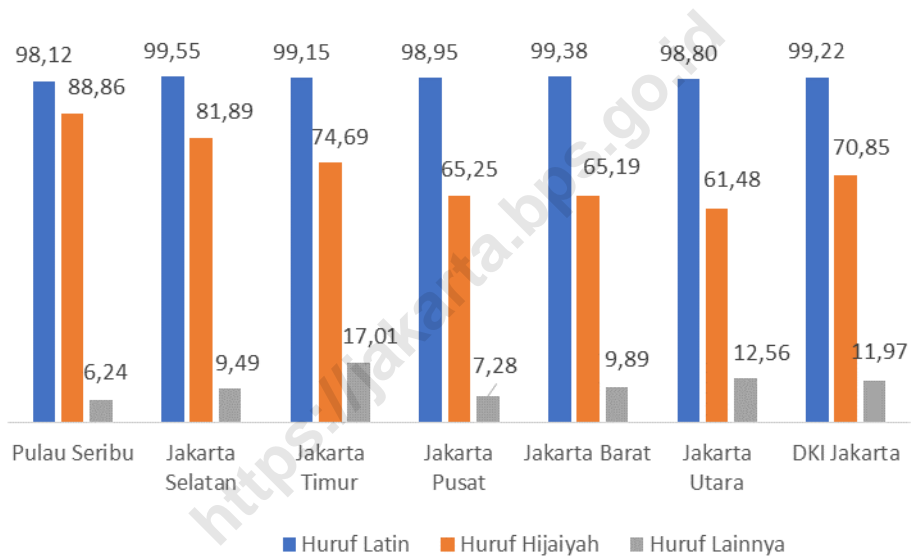
Salah satu agenda pembangunan seperti tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan arah kebijakan dan strategi pendidikan nasional yang mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada bagian ini akan dibahas indikator-indikator yang mampu menunjukkan kualitas pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan terutama di DKI Jakarta. Beberapa indikator yang akan dibahas antara lain angka melek huruf, angka putus sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat penyelesaian pendidikan peserta didik.

6.1 Akses Melek Huruf (AMH)

Kita sering kali mendengar istilah membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca seseorang dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki, sehingga dengan membaca seseorang akan bertambah wawasannya. Dengan demikian melalui membaca kualitas diri seseorang telah bertambah. Mereka yang tidak mampu membaca kehilangan kesempatan untuk mengembangkan dirinya.

Angka melek huruf (AMH) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis. Indikator ini digunakan juga sebagai ukuran efektif sistem pendidikan dasar. Sejak 10 tahun terakhir, angka melek huruf digunakan sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator angka melek huruf kerap digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi (Bappenas, 2020).



Sumber: Susenas Maret, 2022

Gambar 6.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Pada tahun 2022 hampir semua (99,22 %) penduduk DKI Jakarta usia 15 tahun ke atas mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin/alfabet. Data kemampuan membaca dan menulis huruf latin di kabupaten/kota menunjukkan terendah di Kabupaten Kepulauan Seribu (98,12 %) dan tertinggi di Kota Jakarta Selatan (99,55 %) (Gambar 6.1).

Selain mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin/alfabet sebagian penduduk juga mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf Arab/Hijaiyah. Persentase penduduk dengan kemampuan membaca dan menulis huruf Hijaiyah mencapai 70,85 persen. Sementara itu kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya diluar huruf Latin dan Hijaiyah (misal huruf Kanji, dll) sangat sedikit yaitu 11, 97 persen.

Tabel 6.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Latin/Alfabet, dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Kabupaten/ Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pulau Seribu	98,69	97,53	98,12
Jakarta Selatan	99,69	99,40	99,55
Jakarta Timur	99,61	98,70	99,15
Jakarta Pusat	99,21	98,69	98,95
Jakarta Barat	99,66	99,11	99,38
Jakarta Utara	99,34	98,26	98,80
DKI Jakarta	99,55	98,88	99,22

Sumber: Susenas Maret, 2022

Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis huruf latin lebih tinggi pada penduduk laki-laki (99,55 %) dibandingkan penduduk perempuan (98,88 %). Tampak bahwa hampir seluruh penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas mampu membaca dan menulis huruf latin (Tabel 6.1).

Berdasarkan kabupaten/kota dan jenis kelamin tampak bahwa kemampuan membaca dan menulis huruf latin terendah di Kabupaten Kepulauan Seribu baik laki-laki maupun perempuan. Penduduk laki-laki di Kabupaten Kepulauan Seribu yang mampu membaca menulis

sebesar 98,69 persen dan penduduk perempuan sebesar 97,53 persen.

Kemampuan membaca dan menulis huruf Arab/Hijaiyah juga lebih tinggi laki-laki (71,68 %) dibandingkan perempuan (70,03 %). Penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis huruf Arab/Hijaiyah tertinggi di Kabupaten Kepulauan Seribu (88,31 %). Persentase terendah terdapat di Kota Jakarta Utara yaitu 63,64 persen. Pada penduduk perempuan persentase tertinggi juga terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu mencapai 89,42 persen. Seperti halnya penduduk laki-laki, pada penduduk perempuan paling rendah juga ada di Kota Jakarta Utara hanya sebesar 59,30 persen (Tabel 6.2).

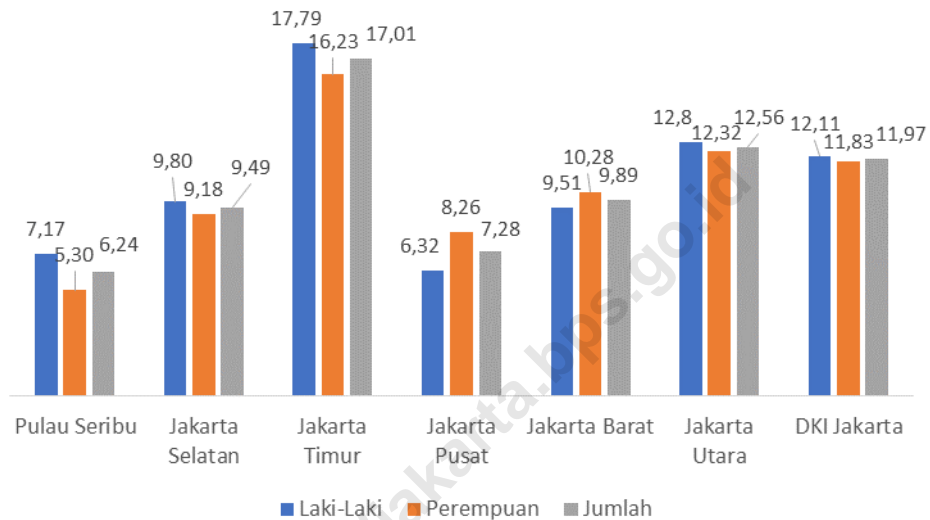
Tabel 6.2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Arab/Hijaiyah, dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Kabupaten/ Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pulau Seribu	88,31	89,42	88,86
Jakarta Selatan	82,33	81,44	81,89
Jakarta Timur	74,46	74,92	74,69
Jakarta Pusat	66,21	64,27	65,25
Jakarta Barat	66,60	63,77	65,19
Jakarta Utara	63,64	59,30	61,48
DKI Jakarta	71,68	70,03	70,85

Sumber: Susenas Maret, 2022

Kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya pada penduduk umur 15 tahun ke atas mencapai hampir 12 persen, lebih tinggi laki-laki (12,11 %) dibandingkan perempuan (11,83 %). Pada penduduk laki-laki tertinggi di Kota Jakarta Timur mencapai 17,79

persen dan terendah di Kota Jakarta Pusat sebesar 6,32 persen. Sedangkan pada penduduk perempuan tertinggi juga di Kota Jakarta Timur (16,23 %) dan terendah di Kabupaten Kepulauan Seribu (5,30 %) (Gambar 6.2).

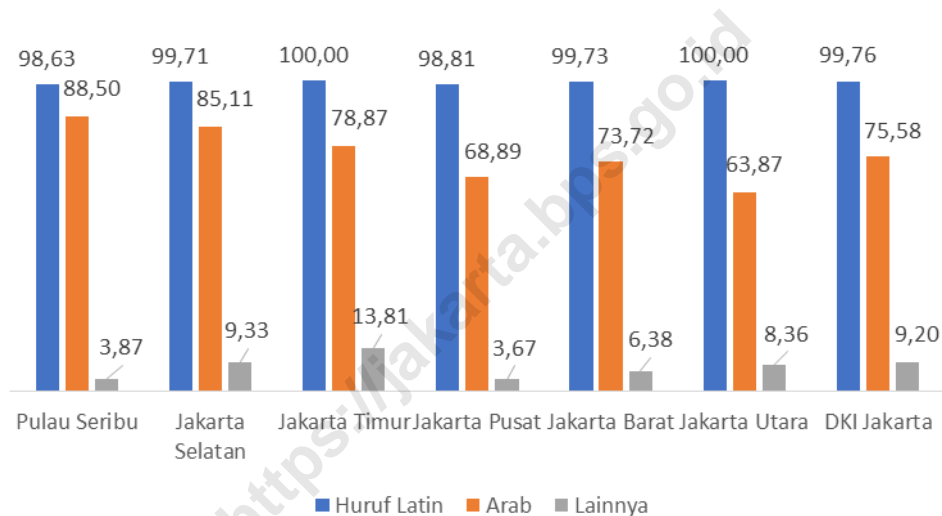


Sumber: Susenas Maret, 2022

Gambar 6.2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Lainnya, dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Pembahasan berikut ini masih terkait dengan kemampuan membaca dan menulis baik huruf latin/alfabet, huruf Arab/Hijaiyah, maupun huruf lainnya. Jika pada pembahasan sebelumnya terkait penduduk umur 15 tahun ke atas, maka pada pembahasan berikut ini dibatasi pada penduduk usia 15 – 24 tahun. Pembatasan usia 15-24 tahun di kaitkan dengan usia sekolah dari pendidikan menengah sampai dengan pendidikan tinggi.

Gambar 6.3 menunjukkan bahwa penduduk usia 15-24 tahun dengan kemampuan membaca dan menulis huruf latin mencapai 99,76 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk 15 tahun ke atas (99,22 %). Dua wilayah kota yaitu Jakarta Timur dan Jakarta Utara bahkan telah mencapai 100 persen atau seluruh penduduk usia 15-24 mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin. Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu yaitu 98,63 persen.



Sumber: Susenas Maret, 2022

Gambar 6.3. Persentase Penduduk Berumur 15 - 24 Tahun Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Gambar 6.3 juga menunjukkan kemampuan membaca menulis huruf Arab/Hijaiyah pada penduduk usia 15-24 tahun sebesar 75,58 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kemampuan yang sama pada penduduk umur 15 tahun ke atas yang mencapai 70,85 persen. Untuk kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya sebesar 9,20

persen pada penduduk umur 15-24 tahun, lebih rendah dibandingkan pada penduduk umur 15 tahun ke atas yang mencapai 11,97 persen.

Kemampuan membaca dan menulis huruf latin penduduk umur 15-24 tahun menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, masing-masing sebesar 99,75 persen dan 99,78 persen. Pada penduduk laki-laki sudah tiga wilayah mencapai 100 persen, sedangkan pada penduduk perempuan baru di dua wilayah (Tabel 6.3).

Tabel 6.3. Persentase Penduduk Berumur 15 - 24 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Latin/Alfabet, dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Kabupaten/ Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pulau Seribu	100,00	97,26	98,63
Jakarta Selatan	99,68	99,74	99,71
Jakarta Timur	100,00	100,00	100,00
Jakarta Pusat	99,09	98,51	98,81
Jakarta Barat	99,58	99,88	99,73
Jakarta Utara	100,00	100,00	100,00
DKI Jakarta	99,75	99,78	99,76

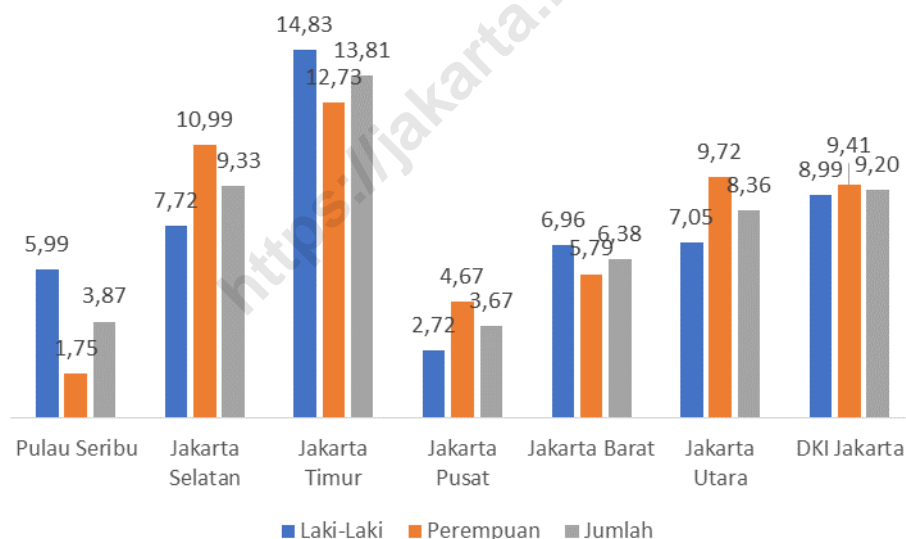
Sumber: Susenas Maret, 2022

Kemampuan membaca dan menulis huruf Arab/Hijaiyah penduduk umur 15 – 24 tahun laki-laki lebih tinggi (76,62 %) lebih tinggi dibandingkan perempuan (74,50 %). Pada laki-laki seperti halnya penduduk laki-laki umur 15 ke atas, pada penduduk 15-24 tahun tertinggi juga di Kabupaten Kepulauan Seribu (88,72 %) disusul Kota Jakarta Selatan (86,35 %). Seperti halnya penduduk laki-laki, pada penduduk perempuan usia 15-24 tahun paling tinggi juga di Kabupaten Kepulauan Seribu (88,28 %) dan Kota Jakarta Selatan (83,85 %).

Tabel 6.4. Persentase Penduduk Berumur 15 - 24 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Arab/Hijaiyah, dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Kabupaten/ Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pulau Seribu	88,72	88,28	88,50
Jakarta Selatan	86,35	83,85	85,11
Jakarta Timur	78,57	79,19	78,87
Jakarta Pusat	72,65	64,96	68,89
Jakarta Barat	73,06	74,40	73,72
Jakarta Utara	68,01	59,58	63,87
DKI Jakarta	76,62	74,50	75,58

Sumber: Susenas Maret, 2022



Sumber: Susenas Maret, 2022

Gambar 6.4. Persentase Penduduk Berumur 15 - 24 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Lainnya, dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2022

Penduduk perempuan umur 15-24 tahun yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya (9,41 %) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (8,99 %). Persentase tertinggi terdapat di Kota Jakarta Timur yaitu sebesar 14,83 persen penduduk laki-laki dan 12,73 persen penduduk perempuan (Gambar 6.4).

6.2 Angka Putus Sekolah

Putus sekolah merupakan suatu kondisi anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah formalnya mulai dari tingkat dasar, lanjut, dan seterusnya karena adanya faktor yang menghambat. Dengan kata lain putus sekolah adalah siswa yang belum sampai tamat atau selesai sekolah tetapi sudah berhenti dan tidak melanjutkan kembali sekolahnya.

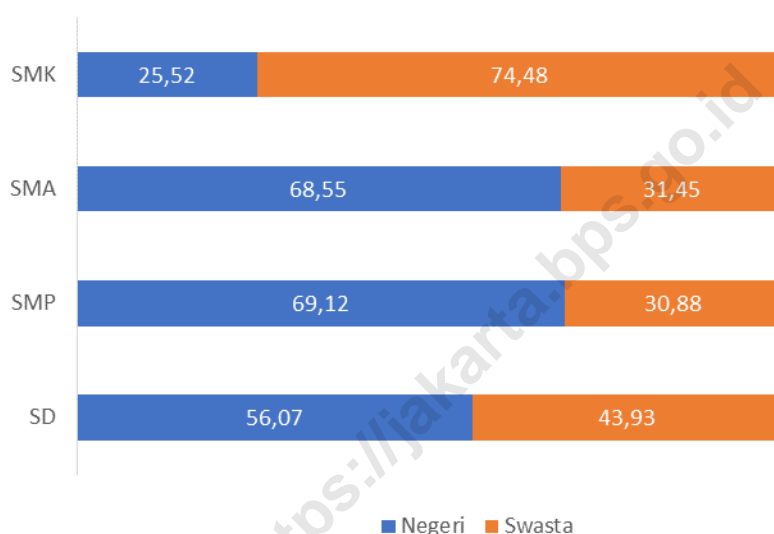
Pada bagian ini akan dibahas jumlah siswa putus sekolah dan angka putus sekolah berdasarkan data dari Pusdatin Kemendikbudristek RI yang meliputi putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD), SMP, SMK, dan SMA.

Tabel 6.5. Jumlah Putus Sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK Menurut Status Negeri dan Swasta di DKI Jakarta, 2012/2022

Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	457	358	815
SMP	188	84	272
SMA	231	106	337
SMK	49	143	192
Jumlah	925	691	1.616

Sumber: Pusdatin Kemendikbudristek, 2023

Jumlah putus sekolah di DKI Jakarta berdasarkan data Pusdatin Kemendikbudristek Tahun 2023 sebanyak 1.616 siswa dengan rincian 815 siswa SD, 272 siswa SMP, 337 siswa SMA, dan 192 siswa SMK. Apabila dirinci menurut sekolah negeri dan swasta tampak bahwa jumlah putus sekolah negeri mencapai 925 siswa (57,24 %) dan swasta (42,76 %) (Tabel 6.5).



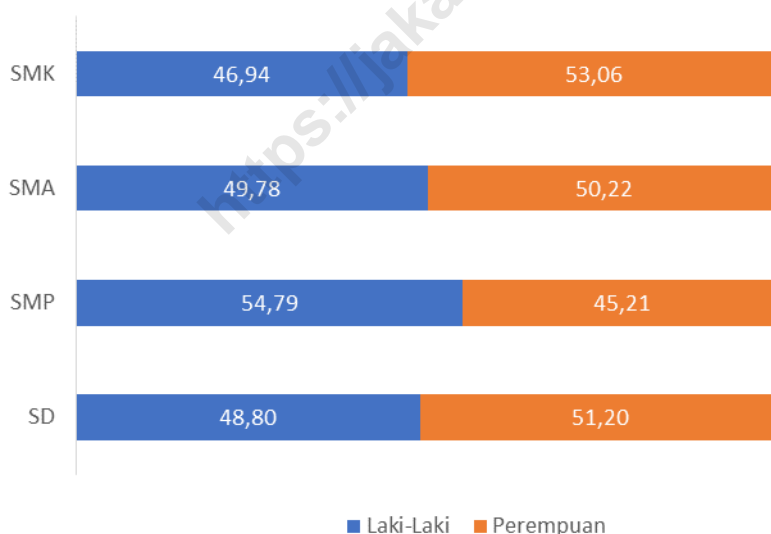
Sumber: Pusdatin Kemendikbudristek, 2023

Gambar 6.5. Persentase Putus Sekolah Siswa SD, SMP, SMA, dan SMK Menurut Status Negeri dan Swasta di DKI Jakarta, 2021/2022

Persentase siswa putus sekolah menurut tingkat pendidikan dan status negeri swasta ditampilkan pada Gambar 6.5. Persentase siswa putus sekolah pada sekolah negeri lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah swasta untuk semua tingkatan pendidikan, kecuali pada SMK. Pada jenjang pendidikan SD tampak bahwa dari total siswa putus sekolah SD, lebih dari separoh (56,07 %) berasal dari SDN. Pada jenjang pendidikan SMPN dan SMAN persentase siswa putus sekolah masing-masing sebesar 69,12 persen dan 68,55 persen. Tetapi pada

SMKN jumlah siswa putus sekolah hanya sekitar seperempat (25,52 %) dari total siswa putus sekolah (Gambar 6.5).

Persentase siswa putus sekolah pada sekolah negeri menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin menunjukkan bahwa lebih dari separo siswa putus sekolah merupakan siswa dengan jenis kelamin perempuan untuk semua jenjang pendidikan negeri kecuali pada jenjang pendidikan SMPN (Gambar 6.2). Putus sekolah pada jenjang pendidikan SMPN lebih dari separo (54,79 %) merupakan siswa laki-laki dan sisanya 45,21 persen merupakan siswa perempuan. Sedangkan persentase siswa perempuan putus sekolah pada jenjang pendidikan SDN, SMAN, dan SMKN masing-masing sebesar 51,20 persen, 50,22 persen, dan 53,06 persen (Gambar 6.6).

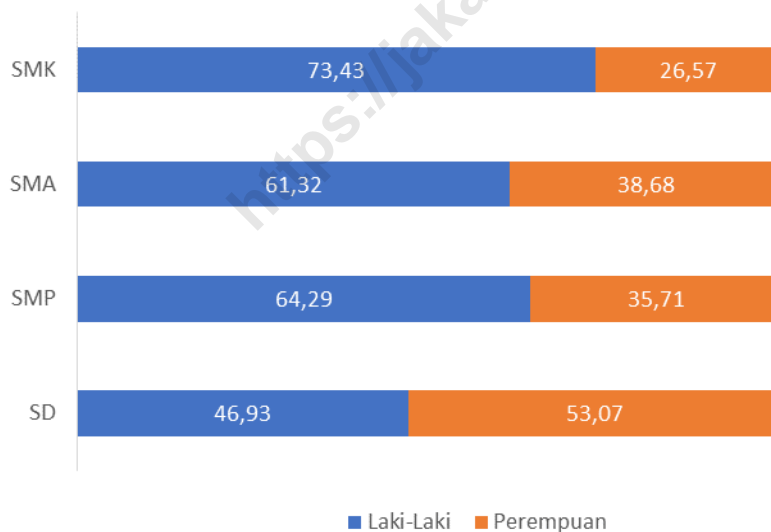


Sumber: Pusdatin Kemendikbudristek, 2023

Gambar 6.6. Persentase Putus Sekolah Siswa SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri di DKI Jakarta, 2021-2022

Berbeda dengan sekolah negeri dimana persentase putus sekolah lebih banyak terjadi pada siswa perempuan, pada sekolah swasta persentase putus sekolah justru lebih banyak dialami oleh siswa laki-laki. Hal ini terjadi di semua tingkat pendidikan sekolah swasta, kecuali pada SD swasta.

Jumlah siswa putus sekolah pada SDS lebih dari separonya (53,07 %) adalah perempuan dan sisanya (46,93 %) adalah siswa laki-laki. Persentase siswa laki-laki putus sekolah pada SMPS dan SMAS masing-masing sebesar 64,29 persen dan 61,32 persen. Pada jenjang pendidikan SMKS hampir tiga perempat siswa putus sekolah merupakan siswa laki-laki (73,43 %) dan sisanya siswa perempuan (26,57 %) (Gambar 6.7).



Sumber: Pusdatin Kemendikbudristek, 2023

Gambar 6.7. Persentase Putus Sekolah Siswa SD, SMP, SMA, dan SMK Swasta di DKI Jakarta, 2021-2022

Tabel 6.6. Perkembangan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SMA dan SMK di DKI Jakarta, 2018-2023

Tahun Ajaran	SMK	SMA
(1)	(2)	(3)
2018/2019 – 2019/2020	0,15	0,08
2019/2020 – 2020/2021	0,91	0,84
2020/2021 – 2021/2022	0,20	0,24
2021/2022 – 2022/2023	0,09	0,19

Sumber: Pusdatin Kemendikbudristek, 2023

Tabel 6.6 memberikan gambaran perkembangan angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK di DKI Jakarta dari tahun ajaran 2018/2019 – 2019/2020 sampai dengan 2021/2022 – 2022/2023. Tampak bahwa angka putus sekolah SMK tertinggi pada tahun 2019/2020 – 2020/2021 mencapai 0,91 dan terendah sebesar 0,09 pada rentang waktu 2021/2022 – 2022/2023. Pada jenjang pendidikan SMA angka putus sekolah tertinggi sebesar 0,84 pada tahun 2019/2020 – 2020/2021 dan terendah sebesar 0,08 pada tahun 2018/2019 – 2019/2020.

6.3 Rata-rata Lama Sekolah

Ada dua indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk yang sekaligus digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Secara umum RLS penduduk di Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, RLS Provinsi DKI Jakarta sebesar 11,05 tahun, maknanya rata-rata

penduduk Provinsi DKI Jakarta usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan selama 11,05 tahun atau masuk kelas XII (kelas III SMA). Pada tahun 2019, RLS DKI Jakarta sebesar 11,06, tahun 2020 sebesar 11,13, tahun 2021 sebesar 11,17 dan pada tahun 2022, RLS Provinsi DKI Jakarta menjadi 11,31 tahun atau masuk kelas XII (Kelas III SMA). Dari tahun ke tahun RLS tertinggi tercatat di Kota Jakarta Timur dan terendah di Kabupaten Kepulauan Seribu. RLS Kota Jakarta Timur pada tahun 2018 sebesar 11,64 tahun, meningkat menjadi 11,73 tahun pada tahun 2022. Sementara itu, RLS Kabupaten Kepulauan Seribu pada tahun 2018 sebesar 8,46 tahun, meningkat menjadi 9,02 tahun pada tahun 2022.

Tabel 6.7. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2022 (Tahun)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	8,46	8,47	8,68	8,81	9,02
Jakarta Selatan	11,57	11,62	11,63	11,64	11,66
Jakarta Timur	11,64	11,65	11,66	11,67	11,73
Jakarta Pusat	11,24	11,25	11,38	11,39	11,53
Jakarta Barat	10,38	10,4	10,63	10,78	11,13
Jakarta Utara	10,69	10,7	10,8	10,81	10,82
DKI Jakarta	11,05	11,06	11,13	11,17	11,31

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS

Disparitas RLS antara Kota Jakarta Timur dan Kabupaten Kepulauan Seribu sangat jauh, yakni sebesar 3,18 tahun pada tahun 2018 dan 2,71 tahun pada tahun 2022. Pada tahun 2022, rata-rata penduduk Kota Jakarta Timur usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan selama 11,73 tahun atau masuk kelas XII (kelas III SMA), sedangkan di Kabupaten Kepulauan Seribu telah

menyelesaikan pendidikan selama 9,02 tahun atau masuk kelas IX (kelas III SMP).

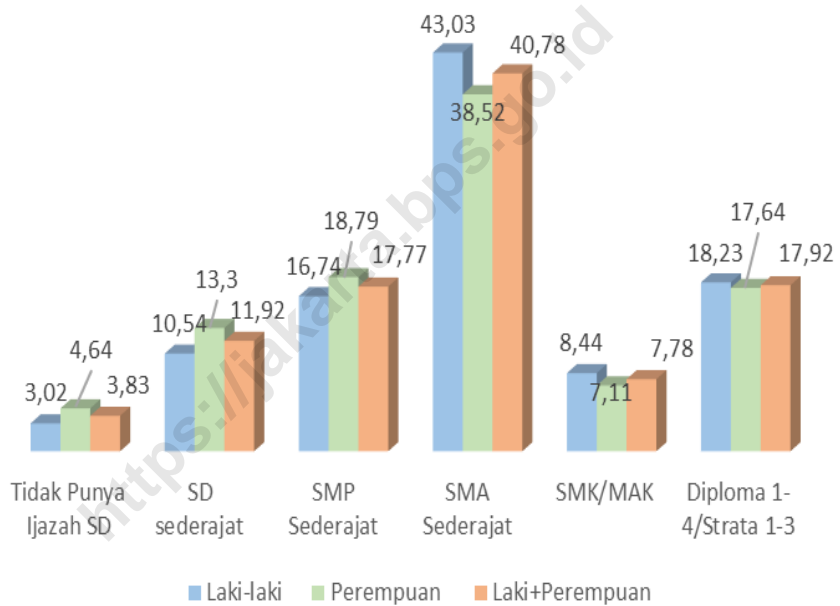
6.4 Tingkat Penyelesaian Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu pilar yang diperlukan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pembangunan bidang pendidikan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas SDM dalam menghadapi era globalisasi, SDM yang andal, tangguh, dan mampu berkompetisi dengan bangsa lain sangat diperlukan agar bangsa kita dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Peningkatan kualitas SDM melalui bidang pendidikan, diwujudkan pemerintah melalui berbagai kebijakan, antara lain pelaksanaan program wajib belajar (Wajar) 6 tahun yang telah dilaksanakan sejak tahun 1984, kemudian ditingkatkan dengan Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun pada tahun 1994. Dalam kurun waktu 2 dasawarsa, dampak positif dari program wajib belajar telah mampu mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi, diharapkan mampu meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Selanjutnya peningkatan produktivitas seseorang dalam kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pada tahun 2022, penduduk usia 15 tahun ke atas di DKI Jakarta mayoritas menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMA/ sederajat (di luar SMK/MAK) sebesar 40,78 persen, tingkat diploma 1-4 dan strata 1-3, sebesar 17,92 persen, tingkat SMP/ sederajat sebesar 17,77 persen, tingkat SD/ sederajat sebesar 11,92 persen, tingkat SMK/MAK sebesar 7,78 persen, dan tidak punya ijazah SD sebesar 3,83 persen.



Sumber : Susenas Maret, 2022

Gambar 6.8 Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin, DKI Jakarta Tahun 2022 (Persen)

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2022). Statistik Pendidikan Indonesia 2022, Jakarta, 2022.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023). Jakarta Dalam Angka 2023, Jakarta, 2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2022). Jakarta Dalam Angka 2022, Jakarta, 2022.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023). Perkembangan Indikator Sosial DKI Jakarta 2023. Jakarta, 2023
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta 2022. Jakarta, 2022.
- Kemendikbud. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tehnologi, Sekretariat Jendral Pusat Data dan Informas (2023). Publikasi Statistik Sekolah Dasar 2022-2023. Jakarta, 2023.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tehnologi, Sekretariat Jendral Pusat Data dan Informas. Publikasi Statistik Sekolah Menengah Pertama 2022-2023. Jakarta, 2023.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tehnologi, Sekretariat Jendral Pusat Data dan Informas. Publikasi Statistik Sekolah Menengah Atas 2022-2023. Jakarta, 2023.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tehnologi, Sekretariat Jendral Pusat Data dan Informas. Publikasi Statistik Sekolah Menengah Kejuruan 2022-2023. Jakarta, 2023.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

<https://jakarta.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Salemba Tengah No. 36-38 Paseban Senen Jakarta Pusat, 10440
Telepon: (021) 31928493; Fax: (021) 3152004
Email: bps3100@bps.go.id; Homepage: <https://jakarta.bps.go.id>